



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

KEBUTHAN INVESTOR DAN KREDITOR ATAS INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

TESIS



**ARMEL YENTIFA
082120007**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

KEBUTUHAN INVESTOR DAN KREDITOR ATAS INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh :

ARMEL YENTIFA

0821220007

(Dibawah Bimbingan Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak dan Suhandi, SE, M.Si, Ak)

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan untuk mengetahui kesesuaian aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah dengan kebutuhan investor dan kreditor. Populasi dalam penelitian ini adalah investor dan kreditor sebagai salah satu kelompok pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan kategori menengah dan besar yang mewakili investor dan pimpinan bank nasional yang terdapat di Sumatera Barat yang mewakili kreditor. Kuesioner disebarakan baik secara personal maupun melalui email.

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah statistik deskriptif dengan menggunakan formula Riduwan (2008). Perbandingan antara aturan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan kebutuhan pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Sebagai analisis tambahan pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan responden terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah digunakan uji *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA).

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa informasi kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap aturan, kinerja, perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Setelah dibandingkan dengan aturan pelaporan keuangan pemerintah yang ada di Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerintah) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, ternyata aturan pelaporan keuangan pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan responden. Sementara itu, hasil MANOVA menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan responden atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata-kata kunci: kebutuhan informasi investor dan kreditor, pelaporan keuangan pemerintah daerah

**KEBUTUHAN INVESTOR DAN KREDITOR ATAS
INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Oleh :

ARMEL YENTIFA

082120007

TESIS

**Sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi
pada Program Pascasarjana Universitas Andalas**

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

2010

Judul Penelitian : Kebutuhan Investor dan Kreditor Atas Informasi Dalam
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nama Mahasiswa : ARMEL YENTIFA

Nomor Pokok : 0821220007

Program Studi : Akuntansi

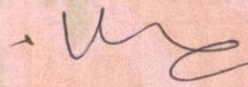
Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia ujian akhir
Magister Sains Akuntansi pada Program Pascasarjana Universitas Andalas dan
dinyatakan lulus pada tanggal 3 Agustus 2010.

Menyetujui :

1. Komisi Pembimbing

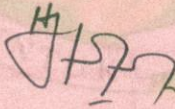


Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak
Ketua

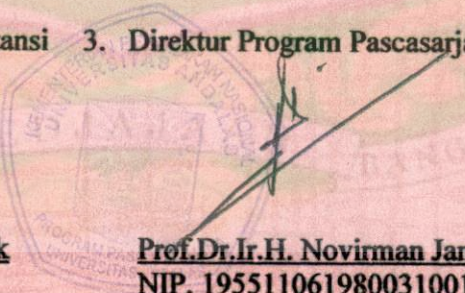
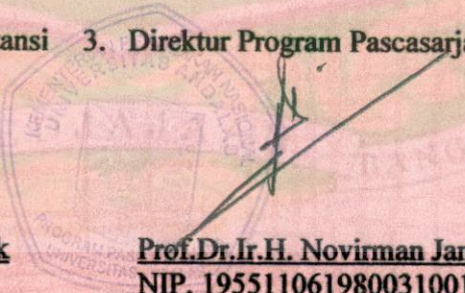


Suhanda, SE, M.Si, Ak
Anggota

2. Ketua Program Studi Akuntansi 3. Direktur Program Pascasarjana



Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak
NIP. 196404141990022001



Prof. Dr. Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc
NIP. 195511061980031001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 1 April 1978 di Solok, sebagai anak bungsu 7 bersaudara dari Ayah H. Lubis MS dan Ibu Hj. Darnis. Penulis menamatkan SD pada tahun 1990, SMP tahun 1994 dan SMA pada tahun 1997 di Solok. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi-Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas Padang pada tahun 2002.

Dari awal tahun 2005 sampai sekarang Penulis bekerja di Politeknik Universitas Andalas Padang sebagai staf pengajar pada jurusan akuntansi. Pada tahun 2008 memperoleh kesempatan Program S2 Kekhususan Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang. Penulis menikah pada tahun 2007 dengan Benny Wahyudi, ST. M.Si dan dianugerahi seorang putri, Aqnia Mazaya.



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

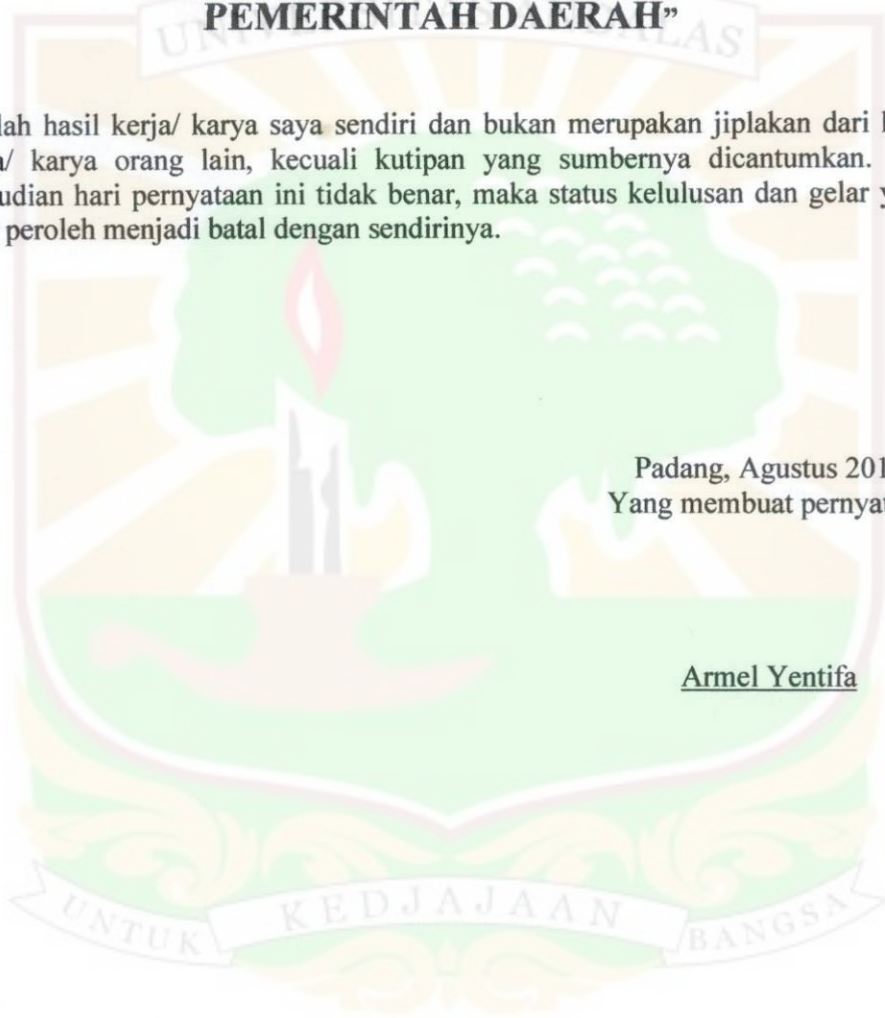
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul :

” KEBUTUHAN INVESTOR DAN KREDITOR ATAS INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”

Adalah hasil kerja/ karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/ karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Agustus 2010
Yang membuat pernyataan

Armel Yentifa



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Sains Akuntansi, dengan judul “Kebutuhan Investor dan Kreditor Atas Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Selama penyusunan Tesis ini, penulis sangat banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil sehingga Tesis ini dapat terwujud.

Pada kesempatan ini penulis haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ibunda & Ayahnda dan mertuaku yang selalu memberikan dorongan moril, semangat dan pengorbanan sehingga penulis dapat mencapai cita-cita.
2. Suamiku tercinta Benny Wahyudi, ST. M.Si dan anakku tersayang Aqnia Mazaya yang selalu memberikan semangat, perhatian dan kasih sayang.
3. Kakak-kakakku yang selalu memberikan dorongan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan.
4. Ibu Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak dan Bapak Suhandi, SE, M.Si. Ak sebagai Komisi Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga selesainya penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Seluruh Dosen S-2 Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara

6. Pimpinan dan rekan kerja di Politeknik Universitas Andalas yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu
7. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang dan seluruh staf yang telah memberikan pelayanan selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Pimpinan Perusahaan dan Pimpinan Bank yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.
9. Mahasiswa dan mahasiswi S-2 Akuntansi Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Negara angkatan 2008.
10. Mahasiswa Politeknik dan teman-teman yang telah membantu menyebarkan kuesioner penelitian ini.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapat pahala dari Allah SWT. Dalam penulisan tesis ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin namun penulis yakin tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kontribusi Penelitian.....	8
1.5 Batasan Penelitian.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
II TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	10
2.1 Kerangka Konseptual Akuntansi.....	10
2.1.1 Tujuan Pelaporan Keuangan	12
2.1.2 Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi	14
2.1.3 Pengakuan dan Pengukuran.....	18
2.1.4 Lingkup Pelaporan Keuangan	19
2.1.5 Elemen Laporan Keuangan.....	20
2.2 Pendekatan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan	20
2.3 Pelaporan Keuangan Pemerintahan.....	21
2.3.1 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	21
2.3.2 Lingkungan Akuntansi Pemerintahan.....	23
2.3.3 Pengguna Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	24
2.3.4 Kebutuhan Informasi Pengguna Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	26
2.3.5 Entitas Pelaporan dan Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah.....	26
2.3.6 Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	26
2.3.7 Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	28
2.3.8 Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Pemerintah.....	28
2.3.9 Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah... ..	31
2.3.10 Pengukuran dan Pengakuan Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	33
2.4 Lingkup Pelaporan Keuangan Pemerintahan.....	34
2.4.1 Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia.....	35
2.4.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.....	37
2.4.3 Pelaporan Keuangan Pemerintah di Beberapa Negara.....	41
2.5 Review Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis.....	43
2.6 Model Penelitian.....	46

III	METODOLOGI PENELITIAN.....	47
3.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	47
3.2	Sumber Data Dan Desain Instrumen Penelitian.....	49
3.2.1	Sumber Data.....	49
3.2.2	Desain Instrumen Penelitian.....	49
3.3	Definisi Operasional	50
3.4	Pengukuran Variabel Penelitian.....	51
3.5	Metode Analisis Data.....	53
3.5.1	Uji Normalitas.....	53
3.5.2	Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data.....	53
3.5.3	Analisis Deskriptif.....	54
3.5.4	Analisis Kesesuaian Aturan Pelaporan Keuangan Pemerintah dengan Kebutuhan Investor dan kreditor atas informasi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	55
3.5.5	Pengujian Pengaruh Karakteristik Responden Terhadap Masing-Masing Variabel Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	56
IV	PEMBAHASAN.....	57
4.1	Profil Responden.....	57
4.2	Hasil Analisis Data.....	59
4.2.1	Pengujian Asumsi Normalitas Data.....	59
4.2.2	Hasil Pengujian Validitas	59
4.2.3	Hasil Uji Reliabilitas.....	62
4.3	Analisis Deskriptif Jawaban Responden.....	63
4.4	Perbandingan Kesesuaian Aturan Pelaporan Keuangan Pemerintah dengan Kebutuhan Investor dan Kreditor Atas Informasi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah.....	71
4.5	Pengujian Pengaruh Karakteristik Responden terhadap Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	75
4.6	Interpretasi Hasil Penelitian.....	78
4.7	Rekomendasi.....	85
4.7.1	Rekomendasi Struktur Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 Penyajian Pelaporan Keuangan.....	85
4.7.2	Rekomendasi Struktur dan Isi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	88
V	KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN.....	95
5.1	Kesimpulan.....	95
5.2	Saran.....	95
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	97
5.4	Implikasi Penelitian.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal.	
Tabel 2.1	Perkembangan jenis Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia.....	37
Tabel 2.2	Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Di Negara Kanada dan New Zealand.....	41
Tabel 3.1	Variabel Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	50
Tabel 4.1	<i>Response Rate</i> Responden.....	57
Tabel 4.2	Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
Tabel 4.3	Profil Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.....	58
Tabel 4.4	Profil Responden Berdasarkan Usia.....	58
Tabel 4.5	Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Normalitas Data.....	59
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Validitas Variabel Kondisi Keuangan.....	60
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Validitas Variabel Kondisi Ekonomi.....	60
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Terhadap Aturan.....	61
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Validitas Variabel Kinerja.....	61
Tabel 4.11	Hasil Pengujian Validitas Variabel Perencanaan dan Penganggaran.....	61
Tabel 4.12	Hasil Pengujian Validitas Variabel Naratif.....	62
Tabel 4.13	Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen.....	63
Tabel 2.14	Distribusi Frekuensi Responden yang Sudah Menggunakan Pelaporan Keuangan Pemerintah Dalam Pengambilan Keputusan.....	63
Tabel 4.15	Tingkat Capaian Rata-Rata Jawaban Investor dan Kreditor Atas Kebutuhan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	64
Tabel 4.16	Hasil Analisis Deskriptif Jawaban Responden.....	65
Tabel 4.17	Informasi Yang Paling Dibutuhkan Oleh Investor Dan Kreditor.....	67
Tabel 4.18	Tingkat Capaian Rata-Rata Jawaban Investor Atas Kebutuhan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	68
Tabel 4.19	Tingkat Capaian Rata-Rata Jawaban Kreditor Atas Kebutuhan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	69
Tabel 4.20	Informasi Yang Paling Dibutuhkan Oleh Investor.....	70
Tabel 4.21	Informasi Yang Paling Dibutuhkan Oleh Kreditor.....	71

Tabel 4.22	Kesesuaian PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Dengan Kebutuhan Investor dan Kreditor Atas Informasi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	72
Tabel 4.23	Hasil <i>Multivariate Tests</i>	76
Tabel 4.24	Hasil <i>Test of Between-Subjects Effects</i>	77
Tabel 4.25	Karakteristik Responden yang Signifikan Mempengaruhi Kebutuhan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah.....	78
Tabel 4.26	Jenis Pelaporan Keuangan dan Informasi yang di Kandung.....	81
Tabel 4.27	Ikhtisar Struktur Usulan PSAP No. 1.....	86



DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Versi FASB	11
Gambar 2.2 Lingkup Pelaporan Keuangan Versi FASB (SFAC No.5)	20
Gambar 2.3 Lingkup Pelaporan Keuangan Pemerintah Versi GASB.....	35
Gambar 2.4 Model Penelitian.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pengantar Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas Data
- Lampiran 4 Hasil Uji Validitas
- Lampiran 5 Hasil Uji Reabilitas
- Lampiran 6 Rekapitulasi Jawaban Responden
- Lampiran 7 Hasil Uji Manova



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mewujudkan *good government governance* di Indonesia adalah dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KKSAP, 2005). Sedangkan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KKSAP, 2005).

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentunya ada suatu jaminan bahwa segala informasi atau peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan suatu ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk pelaporan keuangan, dimana kita dapat melihat segala yang terjadi di dalam entitas tersebut, yaitu pemerintahan. Melalui pelaporan keuangan pemerintah, berbagai pihak seperti masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah itu sendiri dapat menggunakan informasi yang terkandung didalamnya untuk pengambilan keputusan. Pendapat senada dikemukakan oleh Ryan et al. (2002) dalam Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan pemerintah yaitu *accountability* (akuntabilitas) dan *decision usefulness* (pengambilan keputusan). Hal yang senada juga dinyatakan dalam SAP (2005) paragraf 10, bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang

berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

Tetapi berdasarkan beberapa studi yang telah dilakukan ternyata informasi yang terdapat dalam pelaporan keuangan pemerintah tidak digunakan dalam pengambilan keputusan. Di Swedia para politisi dan manajer senior pemerintahan tidak menggunakan informasi akuntansi akrual yang disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintahnya (Paulsson, 2006). Sementara itu, di Italia para pengguna juga belum memanfaatkan informasi akuntansi pemerintahannya (Steccolini, 2002). Demikian juga dengan di Indonesia, kepala SKPD tidak memanfaatkan secara optimal informasi yang terdapat dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah (Fontanella, 2010).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi pengguna dalam memanfaatkan pelaporan keuangan Pemerintah daerah. Hasil penelitian di Swedia menunjukkan bahwa pengguna tidak memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah karena beban kerja yang berat dan ketidakpahaman mereka atas informasi akuntansi akrual yang tersedia (Paulsson, 2006). Steccolini juga menemukan bahwa para pengguna tidak memanfaatkan informasi akuntansi pemerintahannya karena rendahnya kualitas informasi yang tersedia (Steccolini, 2002). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Daniels and Daniels (1991) menyimpulkan bahwa informasi yang berisi pelaporan keuangan *municipal* tidak cukup untuk mengevaluasi kondisi keuangan suatu *municipality*. Hasil penelitian Yuliari (2003) juga menyimpulkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban pemerintah berupa Nota Perhitungan Anggaran Negara (PAN) tidak sesuai kebutuhan *stakeholder* pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia.

Di Indonesia pengguna belum memanfaatkan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah antara lain disebabkan oleh lemahnya teori dan praktik akuntansi pemerintahan serta rendahnya pemahaman SDM pemerintahan terhadap akuntansi pemerintahan itu sendiri (Hapsari, 2008). Sementara Martiningsih (2008) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi masyarakat sebagai salah satu pengguna pelaporan keuangan pemerintah. Senada dengan Martiningsih, Fontanella (2010) juga menyatakan tingkat pendidikan, latar

belakang pendidikan, pengetahuan akuntansi serta kesesuaian antara informasi yang dibutuhkan dengan informasi yang tersaji didalam pelaporan keuangan mempengaruhi pemanfaatan pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh kepala SKPD, selain itu Fotanella menambahkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah belum dimanfaatkan secara optimal oleh kepala SKPD, hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan waktu antara penyusunan pelaporan keuangan dan penganggaran, kentalnya pengaruh faktor loby, politik, budaya dalam organisasi pemerintahan, keterbatasan SDM, kurangnya motivasi dan permasalahan regulasi keuangan pemerintahan.

Pengembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia menggunakan referensi internasional (*International Public Sector Accounting Standards* atau IPSAS dengan memperhatikan praktik yang lazim berlaku di Indonesia. Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah tidak diawali dengan riset kebutuhan informasi pengguna pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia. Akibatnya, proses awal penyusunan standar akuntansi pemerintah tentang ragam dan isi pelaporan keuangan lebih merupakan proses kajian pustaka. Ini tentunya tidak mendasarkan pada kondisi riil kebutuhan masyarakat (Bastian, 2006). Untuk itu perlu dilakukan riset dalam akuntansi sektor publik untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan pengguna dalam pelaporan keuangan pemerintahan. Penelitian tentang kebutuhan pengguna informasi pelaporan keuangan pemerintah mengarah pada penelitian untuk kebijakan penyusunan standar akuntansi pemerintah, khususnya standar pelaporan keuangan pemerintah (PSAP 1).

Informasi akuntansi yang tersaji didalam pelaporan keuangan pemerintahan digunakan oleh berbagai pengguna. Mardiasmo (2004) mengidentifikasi sepuluh pemakai pelaporan keuangan pemerintah, yaitu: (1) pembayar pajak (*tax payer*), (2) pemberi dana bantuan (*grantors*), (3) investor dan kreditor, (4) pengguna jasa (*fee-paying service recipients*), (5) Karyawan/pegawai, (6) pemasok (*vendors*), (7) dewan legislatif, (8) manajemen, (9) pemilih (*voters*), (10) badan pengawas (*oversight bodies*). Jones & Pendlebury (2000) menyebutkan bahwa informasi akuntansi pemerintah digunakan oleh pembayar pajak, pemberi donasi, investor, *fee paying recipients*, manajemen dan *voters*.

Jadi, setiap informasi akuntansi yang dihasilkan tidak ditujukan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan informasi masing-masing kelompok pengguna.

Penelitian ini akan difokuskan pada kelompok Investor dan Kreditor yang merupakan salah satu pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah. Informasi yang disajikan didalam pelaporan keuangan pemerintahan seharusnya bisa dimanfaatkan oleh investor dan kreditor khususnya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam berinvestasi di suatu daerah atau berinvestasi pada proyek-proyek pemerintah dan keputusan pemberian kredit pada pemerintah daerah ataupun pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, karena tujuan pelaporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai media akuntabilitas tetapi juga berfungsi untuk *decision usefulness* (pengambilan keputusan) Ryan et al. (2002) dalam Mulyana (2006).

Investasi merupakan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi riil (Sarana, 2010). Sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata. Peranan investasi di Indonesia cenderung meningkat sejalan dengan banyaknya dana yang di butuhkan untuk melanjutkan pembangunan nasional. Investasi merupakan suatu faktor yang krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Tidak mudah bagi suatu daerah untuk menarik investor menanamkan modalnya disuatu daerah, demikian juga dengan daerah sumatera barat, hal ini ditandai dengan penurunan investasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2003-2005 nilai investasi di Sumatera Barat berdasarkan harga konstan memperlihatkan trend yang menurun secara berturut-turut sebesar 5.081,41 Milyar, 4.830,44 Milyar dan 4.777,13 Milyar (BPS, 2005). Dilihat dari ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) tahun 2006-2009, ICOR Sumatera Barat memperlihatkan trend yang menurun. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 adalah 3,6, pada tahun 2008 turun nilainya menjadi 3,5 dan pada tahun 2009 turun nilainya menjadi 3,4 (tim peneliti Universitas Andalas, 2009). Padahal Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang handal seperti: hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, Industri olahan, hasil pertanian dan perkebunan, hingga

pariwisata serta sumber daya manusia yang seharusnya merupakan salah satu faktor yang dapat menarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat, tetapi kenyataannya Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki nilai investasi yang terendah di tingkat regional Sumatera BPS (2005).

Berbagai faktor mempengaruhi masuknya investasi ke suatu daerah antara lain: 1) Potensi Sumber daya alam, 2) pertumbuhan PDRB, 3) tenaga kerja yang mencukupi dan upah yang relatif rendah, 4) kebijakan investasi yang mendukung seperti pemberian kemudahan dalam impor barang modal dan bahan baku melalui peraturan-peraturan daerah yang dibuatnya, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, peraturan ketenagakerjaan yang pasti, prosedur kebijakan yang tidak berbelit serta kebijakan yang tidak timpang tindih antara pusat dan daerah, 5) kestabilan politik, penegakan hukum dan terjaganya stabilitas keamanan, 6) menumbuhkembangkan industri-industri penyedia bahan baku dan barang modal dan 7) masalah infrastruktur seperti kondisi jalan, kesiapan sumber daya air, listrik, kondisi geografis yang strategis, akses transportasi yang mudah, pasar yang mudah dijangkau (Prawaty, 1996 diikuti oleh Sarana, 2010). Senada dengan Prawaty dan Sarana, Pambudi (2005) menyatakan bahwa faktor yang paling mempengaruhi investasi disuatu daerah adalah masalah kepastian hukum dan pelayanan dari pemerintah, faktor sosial dan politik, struktur ekonomi, potensi daerah, produktivitas tenaga kerja serta infrastruktur fisik.

Infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan *Public Service Obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah. Keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan, sehingga pada tahap awal pembangunan disuatu negara hal tersebut akan dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah hal ini yang dibiayai dari APBN murni.

Pada saat itupun infrastruktur masih bersifat sebagai *pure public good*, dengan dua ciri pokok yaitu *non-rivalry* (masyarakat pengguna tidak saling bersaing) dan *non-excludable* (siapa pun dapat menggunakannya, tidak hanya sekelompok masyarakat tertentu). Pada tahap selanjutnya akan berkembang

menjadi *semi public good* (sudah mulai bersaing). Permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Permasalahannya justru peningkatan permintaan "diimbangi" dengan penurunan kemampuan Pemerintah (Kurdi, 2010).

Pemerintah masih kesulitan dengan anggaran keuangan negara, sehingga selama ini banyak proyek pemerintah yang didanai dengan pinjaman luar negeri. Menurut Suzeta (2009) kemampuan pendanaan pemerintah untuk pembangunan proyek infrastruktur hanya 30%, untuk itu perlu kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam proyek-proyek pembangunan. Diperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur untuk 2010-2014 mencapai Rp. 1429 triliun atau 3% dari produk domestik bruto (PDB). Salah satu cara yang ditempuh untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menurut Suzeta dalam mengatasi dilema ini adalah kehadiran swasta diperlukan melalui pola kemitraan antara pemerintah dan swasta (*Public-Private Partnership*) yang dapat memfasilitasi terlaksananya transaksi kerja sama proyek infrastruktur antara pemerintah dengan swasta.

Public-Private Partnership seharusnya dimotivasi melalui berbagai insentif, seperti *tax holiday*, tarif yang layak, dsb. Disamping itu, yang sangat mempunyai arti strategis adalah selayaknya Pemerintah memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi peran swasta. Agar konsep privatisasi manajemen proyek infrastruktur bisa berjalan maka harus berlaku prinsip *cost-recovery*, yaitu investasi yang ditanamkan pihak swasta bisa kembali (*pay back*).

Selain itu kerjasama dengan bank juga dibutuhkan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dengan likuidnya perbankan nasional yang tercermin di antaranya dari dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang banyak diparkir di SBI, maka pemerintah memutuskan bahwa sebahagian proyek infrastruktur agar dibiayai oleh pinjaman perbankan dalam negeri (Nugroho, 2007). Sebelum memberikan kredit, bank terlebih dahulu melakukan kegiatan penilaian kredit merupakan kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur. Analisis kredit yang kurang akurat pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Penilaian kredit menggunakan Prinsip perkreditan disebut juga sebagai konsep 5C dan 7P untuk mengevaluasi nasabahnya. Pada dasarnya konsep ini akan dapat memberikan informasi mengenai iktikad baik (*willingnes to pay*)

dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya.

Dalam perspektif pengguna, pengguna akan memanfaatkan pelaporan keuangan pemerintah jika informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar dapat bermanfaat maka pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusannya, namun berdasarkan kesimpulan sementara peneliti, Pelaporan keuangan pemerintah belum mengungkapkan informasi penting yang membantu investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan karena pelaporan keuangan saat ini lebih mengutamakan tujuan akuntabilitas dari pada tujuan prospektif dan prediktif yang seharusnya sama-sama diutamakan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Informasi Apakah yang dibutuhkan oleh investor dan kreditor dari pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai kebutuhan investor dan kreditor?
3. Apakah tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan investor dan kreditor mempengaruhi kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis informasi apakah yang dibutuhkan investor dan kreditor terhadap pelaporan keuangan pemerintahan daerah.
2. Untuk mengetahui apakah aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai kebutuhan investor dan kreditor.

3. Untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan investor dan kreditor terhadap kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi:

- a. Bagi pihak eksekutif sebagai pengguna dan sekaligus sebagai penyaji pelaporan keuangan pemerintah: mendorong agar lebih menyadari pentingnya penyajian pelaporan keuangan secara lengkap dan pemberian kemudahan kepada penggunanya untuk mengakses pelaporan keuangan tersebut. Penyajian pelaporan keuangan bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang digariskan oleh peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga harus disadari bahwa penyajian pelaporan keuangan tersebut dibutuhkan sebagai sarana peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan kepada pengguna serta untuk pengambilan keputusan.
- b. Bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah: sebagai bahan pertimbangan Komite Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyempurnakan Standar Akuntansi Pemerintah khususnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 1 tentang Penyajian pelaporan Keuangan.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana dan literatur penelitian akuntansi dan pemanfaatan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Karena keterbatasan dana dan waktu penelitian ini dilakukan pada hanya di wilayah provinsi Sumatera Barat. Diharapkan nanti akan di lanjutkan untuk semua provinsi di Indonesia.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sebagai hasil dari penelitian, penulisan tesis ini diorganisasikan dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang yang berisi pentingnya melakukan penelitian tentang kebutuhan informasi pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian. Selain itu juga diuraikan sistematika penulisan hasil penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi kajian literatur untuk mengeksplorasi konsep dan teori serta penelitian terdahulu yang mendukung dan menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu menyangkut kebutuhan informasi laporan keuangan pemerintah, pengembangan hipotesis dan model penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi populasi dan sampel penelitian, jenis data dan instrumen pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian yang meliputi analisis statistik deskriptif jawaban responden, pengujian hipotesis, analisis pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan responden terhadap kebutuhan atas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dan rekomendasi penyajian pelaporan keuangan.

BAB V KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan hasil penelitian, saran, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian.

BAB II

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Konseptual Akuntansi

Kerangka konseptual akuntansi adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi yang disusun oleh sebuah komite perumus standar independen dan merupakan rujukan penting bagi komite standar akuntansi, penyusun laporan keuangan dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Menurut Kam (1990) dalam Suwardjono (2005) Manfaat kerangka konseptual adalah:

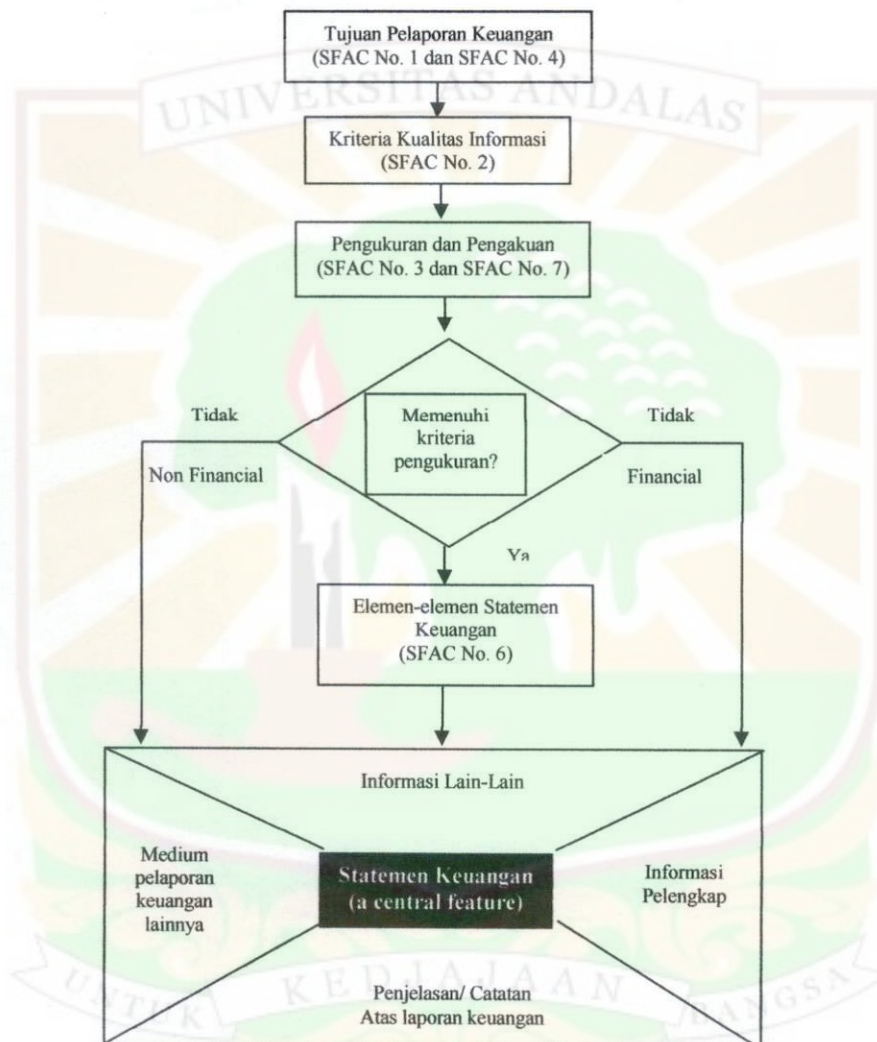
1. Untuk memberikan Pengarahan atau pedoman kepada badan yang bertanggungjawab dalam menyusun standar Akuntansi.
2. Menjadi acuan dalam pemecahan masalah akuntansi yang dijumpai dalam praktek yang belum diatur dalam standar akuntansi.
3. Menentukan batas-batas pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan laporan keuangan
4. Meningkatkan pemahaman pemakai laporan keuangandan meningkatkan keyakinan terhadap laporan keuangan
5. Meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar organisasi.

Senada dengan Kam, tujuan kerangka konseptual akuntansi keuangan menurut SAK adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:

- a. penyusun standar akuntansi keuangan, dalam pelaksanaan tugasnya
- b. penyusun pelaporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan.
- c. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah pelaporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- d. para pemakai pelaporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Gambar berikut ini merupakan kerangka konseptual menurut FASB, kerangka konseptual akuntansi terdiri atas tujuan pelaporan keuangan, karakteristik kualitatif informasi keuangan, pengakuan dan pengukuran serta elemen-elemen laporan keuangan serta elemen-elemen pelaporan keuangan lain.

Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Versi FASB



Sumber : Suwardjono, 2006

Pada bagian berikut, masing-masing bagian kerangka konseptual tersebut akan diuraikan satu persatu.

2.1.1 Tujuan Pelaporan Keuangan

SFAC tidak hanya menjelaskan tujuan pelaporan keuangan bagi organisasi bisnis (SFAC No.1) tetapi juga tujuan pelaporan keuangan organisasi non bisnis (SFAC No. 4), yang mengungkapkan bahwa penyiapan pelaporan keuangan eksternal oleh organisasi bisnis bukanlah merupakan tujuan itu sendiri. Akan tetapi, pelaporan keuangan merupakan penyajian informasi oleh manajemen kepada pemakai. Menurut pernyataan ini tujuan keseluruhan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan kepada pemakainya suatu dasar dalam memilih alternatif penggunaan sumber daya ekonomi yang langka. Tujuan pelaporan keuangan untuk investor, kreditor dan pengguna lainnya adalah:

1. Mengambil keputusan investasi dan kredit.
2. Menilai prospek arus kas.
3. Melaporkan sumberdaya organisasi usaha, klaim atas sumberdaya tersebut dan merubahnya.
4. Melaporkan sumberdaya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemilik.
5. Melaporkan kinerja dan penghasilan.
6. Mengevaluasi likuiditas, solvensi, dan aliran dana.
7. Mengevaluasi *stewardship* dan kinerja manajemen.
8. Menjelaskan dan menginterpretasi informasi keuangan.

Sedangkan menurut FASB dalam Belkaoui (2004) pelaporan keuangan hendaknya memberikan informasi yang berguna bagi para penyedia sumber daya yang sudah ada maupun yang potensial serta para pengguna lainnya dalam menilai jasa yang diberikan dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut. Informasi yang harus di laporkan oleh organisasi non bisnis itu antara lain:

1. Informasi yang bermamfaat dalam menilai kinerja manajemen dan kepengurusan.
2. Informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, sumber daya bersih, dan pembebanan-pembebanannya.
3. Likuiditas

Pelaporan keuangan organisasi non bisnis hendaknya memberikan informasi mengenai bagaimana organisai non bisnis memperoleh dan

menggunakan dana kasnya, mengenai pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman itu serta mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi likuiditas organisasi

4. Penjelasan serta interpretasi manajer untuk membantu penyedia sumber daya dan pengguna-pengguna lainnya memahami informasi keuangan yang mereka terima.

Tujuan pelaporan Keuangan menurut ASOBAT ada 4, yaitu:

1. Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk mencapai ujuan
2. Mengarahkan dan mengontrol sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya
3. Memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan
4. Membantu fungsi dan pengawasan sosial

Menurut Accounting Principles Board tujuan pelaporan keuangan adalah:

- a. Tujuan khusus: menyajikan secara wajar dan sesuai dengan PABU mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan perubahan lain dalam keuangan.
- b. Tujuan umum: memberikan informasi: sumber ekonomi, kewajiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan harta dan kewajiban, serta informasi yang relevan.
- c. Tujuan kualitatif
 1. Relevan (*Relevance*)
 2. Dapat dipahami (*Understanbility*)
 3. Dapat diuji kebenarannya (*Verifiability*)
 4. Netral (*Neutrality*)
 5. Tepat waktu (*timelines*)
 6. Dapat diperbandingkan (*Comparability*)
 7. Kelengkapan (*Completeness*)

Sedangkan menurut SAK NO. 1 tujuan pelaporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambil keputusan. Laporan keuangan

yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak men

2. Menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Pelaporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

2.1.2 Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi

SFAC No. 2 mendefinisikan kualitas yang menjadikan informasi akuntansi bermanfaat dengan mengembangkan sejumlah pedoman untuk melakukan pemilihan pada kedua tingkatan tersebut. Menurut pernyataan ini, kriteria utama dalam memilih alternatif metode akuntansi adalah dengan menanyakan metode mana yang akan menghasilkan informasi yang lebih berguna. Karakteristik kualitatif pelaporan keuangan terdiri dari:

1. Batasan Cost-Benefit

Secara umum berlaku ketentuan bahwa hanya bila manfaat dari produk atau jasa melebihi biaya yang dikorbankan untuk memperolehnya, keputusan untuk perolehan itu dianggap sebagai keputusan yang sehat.

2. Dapat dipahami

Dapat dipahaminya suatu informasi tergantung kepada karakteristik pemakai dan karakteristik yang inheren dalam informasi tersebut. Untuk memenuhi kriteria kemanfaatan, pengambil keputusan haruslah memiliki kemampuan untuk memahami informasi keuangan.

3. Bermanfaat dalam Pengambilan Keputusan

Menurut SFAC No. 1 informasi keuangan diharapkan bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Pernyataan standard ini mengemukakan bahwa relevansi dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang menjadikan informasi akuntansi berguna bagi para pengambil keputusan

4. Relevan

Informasi yang relevan adalah tepat waktu serta memiliki kemampuan memprediksi dan memberikan umpan balik.

5. Kemampuan Memprediksi dan Memberikan Umpan-balik

Informasi dapat menjadikan suatu keputusan berbeda karena dengan informasi tersebut kapasitas pengambil keputusan untuk memprediksi atau merubah ekspektasinya meningkat.

6. Tepat Waktu

Memiliki informasi yang tersedia untuk pengambil keputusan sebelum informasi itu kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Jika informasi tidak tersedia ketika diperlukan atau tersedianya menjadi sangat lama setelah kejadian-kejadian dilaporkan, akan menjadikan informasi itu tidak bernilai, dia kehilangan relevansinya dan akan berkurang atau tidak ada kegunaannya.

7. Reliabilitas

Reliabilitas suatu ukuran tergantung pada apakah yang disajikan oleh ukuran tersebut adalah memang apa yang seharusnya disajikan. Reliabilitas tergantung kepada sejauh mana deskripsi atau pengukuran akuntansi dapat di verifikasi dan benar penyajiannya.

8. Verifiabilitas

Verifiabilitas ditunjukkan oleh adanya suatu konsensus atau kesamaan antara hasil pengukuran yang satu dengan yang lainnya dengan syarat metode pengukuran yang digunakan haruslah sama.

9. Penyajian yang Jujur

Kualitas ini terkait dengan hubungan atau kesesuaian antara sebuah ukuran dengan fenomena yang akan disajikan oleh ukuran tersebut.

10. Netralitas

Sebuah pilihan netral atas beberapa alternatif akuntansi hendaklah bebas dari bias terhadap hasil-hasil yang diharapkan

11. Dapat dibandingkan dan Konsistensi

Manfaat informasi yang diungkapkan oleh sebuah perusahaan akan meningkat bila dia dapat dibandingkan dengan informasi yang sama yang dikeluarkan oleh perusahaan lain ataupun dengan dengan informasi yang sama dari perusahaan yang sama tapi dengan periode waktu yang lain.

12. Materialitas

Tidaklah ada suatu standar umum materialitas yang dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan semua hal yang harus diperhatikan seseorang dalam memberikan pertimbangannya.

Sedangkan karakteristik kualitatif menurut SAK terdiri dari:

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat.

4. Keandalan (*reliabilitas/ faithful representation*) tidak menyesatkan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5. Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

6. Substansi mengungguli dokumen

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum.

7. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan .

8. Pertimbangan sehat (*prudence*)

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

10. Dapat dibandingkan.

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan.

2.1.3 Pengakuan (*Recognition*) dan Pengukuran (*Measurement*)

SFAC No.5 menentukan kriteria pengakuan dan petunjuk informasi apa yang seharusnya dimuat dalam laporan keuangan, serta kapan sebuah informasi harus dilaporkan. Standar ini juga menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan tergantung kepada batasan biaya-manfaat serta materialitas.

SFAC No.7 memberikan petunjuk dalam menggunakan *present value* untuk pengukuran pertamakali. Pernyataan ini juga memberikan petunjuk atas teknik-teknik amortisasi yang didasarkan pada aliran kas di masa datang. Pernyataan ini menyatakan bahwa tujuan dari *present value* adalah untuk menaksir nilai wajar (*fair value*). Pengukuran (*recognition*) berarti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang sesuai dengan standar akuntansi dalam laporan neraca dan laba rugi, yaitu:

1. Ada kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan;
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Menurut SAK, Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca atau laporan laba rugi. Metode pengukuran yang dikenal adalah:

1. Biaya historis (*historical cost*);
2. Biaya kini (*current cost*);
3. Nilai realisasi (*realizable* atau *settlement value*);
4. Nilai sekarang (*present value*).

Yang umum dipakai dalam akuntansi keuangan adalah biaya historis terkecuali ada pos-pos tertentu yang dikaitkan juga dengan metode lain misalnya persediaan

dan surat berharga yang menggunakan harga pasar atau harga terendah dari harga pasar atau harga historis.

2.1.4 Lingkup Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. Pengertian ini lebih luas daripada apa yang dideskripsi oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB) dalam *Statements of Financial Accounting Concepts* (SFAC). FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (*means of communication*) informasi tentang segala kondisi dan kinerja entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan (Suwardjono, 2006). Subramanyam dan wild (2009) menyatakan bahwa pelaporan keuangan (*financial reporting*) lebih luas dari laporan keuangan (*Financial report*), Laporan keuangan merupakan produk proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standar akuntansi. Selain dari laporan keuangan, organisasi dapat membuat pelaporan keuangan lain seperti prospektus, laporan proksi, laporan tentang kondisi ekonomi, laporan tentang industri dan perusahaan, pengungkapan sukarela dan laporan perantara atau laporan analisis. Gambar 2.2 adalah lingkup pelaporan keuangan versi FASB yang berlaku untuk organisasi yang berorientasi laba.



Gambar 2.2
Lingkup Pelaporan Keuangan Versi FASB (SFAC No.5)

Semua Informasi yang bermanfaat untuk keputusan investasi kredit dan sejenisnya (SFAC No. 1 Paragraf 22)				
PELAPORAN KEUANGAN (SFAC No. 1 Paragraf 5-7)				
Bagian yang dipegaruhi oleh standar yang dikeluarkan Badan Berwenang (FASB)				
LAPORAN KEUANGAN DASAR				
LINGKUP	CALK	INFORMASI PELENGKAP	MEDIA PELAPORAN	INFORMASI LAIN
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN Laporan Keuangan * Neraca * Laporan L/R (Laba Komprehensif) * Laporan Arus Kas * Laporan Perubahan Modal	Contoh: * Kebijakan akuntansi * Kontinjensi * Metode Persediaan * Jumlah saham beredar * Alternatif Pengukuran	Contoh: * Pengungkapan tentang perubahan harga (FASB No. 33) * Informasi ttg cadangan minyak Dan gas (FASB No. 69)	LAIN Contoh: * Diskusi dan Analisis Manajemen * Surat pada Pemegang Saham	Contoh: * Diskusi tentang persaingan dan syarat yang ditentukan Pasar Modal * Laporan Analisis * Statistik ekonomi * Artikel baru tentang perusahaan

Sumber: FASB, dalam Martiningsih (2008)

Dari gambar diatas terlihat bahwa pelaporan keuangan lebih luas cakupannya dari laporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak hanya menghasilkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, tetapi informasi lain yang mengandung kebermamfaatan dalam pengambilan keputusan.

2.1.5 Elemen Laporan Keuangan

SFAC No.6 mendefinisikan 10 elemen laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja dan posisi entitas-entitas ekonomi. Kesepuluh elemen itu terdiri dari: asset, kewajiban, ekuitas, investasi pemilik, distribusi kepada pemilik, seluruh pendapatan (*comprehensive income*), penghasilan (*revenues*), beban (*expenses*), keuntungan (*gains*) dan rugi (*losses*) mencerminkan tiang yang membangun laporan keuangan.

2.2 Pendekatan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan

Dalam menentukan standar ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: *representative faithfulness* dan *economic consequences* (Belkaoui, 2005). Pendekatan pertama menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian

secara wajar pelaporan keuangan melalui proses penentuan standar. Atas dasar pendekatan ini, akuntansi disamakan dengan proses pemetaan keuangan (*financial map-making*), dimana peta harus dibuat akurat dengan menggambarkan keadaan keuangan organisasi secara wajar. Pendekatan kedua menghendaki perlunya adopsi standar yang memiliki konsekuensi ekonomi yang menguntungkan. Pendekatan ini mengarah pada penentuan standar yang dihasilkan tidak merugikan kesejahteraan sosial.

2.3 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pada bagian berikut ini akan dibahas 1) tujuan pelaporan keuangan pemerintah, 2) lingkungan akuntansi pemerintah, 3) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna pelaporan keuangan pemerintah, 4) entitas pelaporan keuangan pemerintah, 5) peranan dan tujuan pelaporan keuangan pemerintah 6) asumsi dasar, 7) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah, 8) prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah 9) pengakuan, dan pengukuran serta 10) unsur-unsur yang membentuk pelaporan keuangan pemerintah.

2.3.1 Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

IPSAS menyatakan bahwa tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas yang berguna bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara khusus, tujuan umum dari pelaporan keuangan pemerintah adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna adalah proses pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas mengenai sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi tentang sumberdaya, alokasi dan penggunaan sumber keuangan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai berbagai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- b. menyediakan informasi yang berguna bagi evaluasi kemampuan entitas dalam mendanai berbagai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban dan komitmennya.
- c. menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan entitas dan berbagai perubahan didalamnya.
- d. menyediakan sejumlah informasi yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas berkaitan dengan biaya pelayanan, efisiensi dan prestasi.

Tujuan umum bagi pelaporan keuangan juga dapat memiliki peranan prospektif dan prediktif, menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi tingkat sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan operasi, dan risiko yang menyertai serta ketidakpastiannya (SAP, 2005). Pelaporan Keuangan hendaknya memuat informasi bagi penggunaannya berkaitan dengan:

- a. menunjukkan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran.
- b. menunjukkan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan persetujuan legal dan kontraktual, mencakup batasan keuangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif yang berwenang.

Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 paragraf 9, tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- b. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- c. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

- d. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- f. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Tujuan pelaporan keuangan yang dikemukakan dalam lampiran E.II Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna pelaporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- e. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.3.2 Lingkungan Akuntansi Pemerintah

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan

pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut (SAP, 2005):

(a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:

1. bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
2. sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
3. adanya pengaruh proses politik
4. hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.

(b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:

- 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
- 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan
- 3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

2.3.3 Pengguna Pelaporan Keuangan Pemerintah

Ada beberapa jenis pengguna laporan keuangan seperti pembayar pajak, investor, *fee paying recipients*, manajemen, dll (Jones & Pendlebury, 2000). Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah paragraf 16 menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna pelaporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- a. masyarakat.
- b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa.
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta
- d. pemerintah.

Misra (2008) menyebutkan hal senada bahwa informasi akuntansi pemerintahan digunakan oleh:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah.

2. Badan Pengawas

Badan Pengawas adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK).

3. Investor, kreditur dan donatur

Pihak eksternal yang termasuk dalam investor, kreditur dan donatur meliputi badan atau organisasi, seperti pemerintah, lembaga keuangan, maupun lembaga lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan pemerintahan daerah.

4. Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintahan Daerah

Pihak eksternal yang termasuk dalam kategori analis ekonomi dan pemerhati pemerintahan daerah merupakan pihak-pihak, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain, yang menaruh perhatian atas kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah.

5. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintahan daerah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk atau jasa pemerintah daerah.

6. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki kepentingan yang sangat kuat dengan pemerintah daerah karena tentunya memerlukan laporan keuangan pemerintahan daerah untuk menilai pertanggungjawaban gubernur/bupati/walikota sebagai wakil pemerintah di daerah.

7. Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) lain.

Pemerintah suatu daerah dengan daerah lain saling berhubungan dan memiliki kepentingan dalam hal ekonomi, misalnya dalam rangka melakukan pinjaman.

2.3.4 Kebutuhan Informasi Pengguna Pelaporan Keuangan Pemerintah

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian pelaporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam pelaporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. (PP No. 24/2005 paragraf 18 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan).

2.3.5 Entitas Pelaporan dan Pengguna Pelaporan Keuangan Pemerintah

SAP (2004) menyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri atas:

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah
- d. Organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam penerapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas, dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2.3.6 Peranan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pelaporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pelaporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, serta hasil yang dicapai untuk kepentingan (SAP, 2004):

1. Akuntabilitas
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antar Generasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Selain itu dalam standar penyajian pelaporan keuangan pemerintah paragraf 10 juga dinyatakan bahwa Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

2.3.7 Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan Pemerintah

Asumsi dasar akuntansi atau sering juga diistilahkan dengan dalil akuntansi (*Accounting Postulate*) menurut belkaoui (2004) adalah pernyataan atau aksioma yang sangat jelas, umumnya diterima berdasarkan kesesuaiannya dengan terhadap tujuan pelaporan keuangan, yang menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosial dan hukum dimana akuntansi harus beroperasi.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2004) asumsi dasar yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah:

1. Asumsi kemandirian entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan pelaporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan

2. Asumsi kesinambungan entitas

Pelaporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam

2.3.8 Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Pemerintah

Agar dapat bermanfaat sebuah pelaporan keuangan harus memenuhi beberapa kriteria. Menurut kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan, ada empat karakteristik yang merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar pelaporan keuangan pemerintah bisa memenuhi kualitas yang dikehendaki (SAP, 2004):

1. Relevan

Pelaporan keuangan bisa dikatakan relevan bila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang dan masa kini atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), informasi harus memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), yaitu informasi harus dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu yaitu informasi harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Andal

Informasi dalam pelaporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan dengan jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

- c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam pelaporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau pelaporan keuangan entitas pemerintah lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kendala informasi akuntansi Relevan dan Andal dalam pelaporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan pelaporan keuangan yang relevan dan andal, akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan, hal-hal tersebut adalah:

1. Material

Informasi dipandang material, bila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yang diambil atas dasar pelaporan keuangan. Meskipun idealnya memuat segala informasi, pelaporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.

2. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi, seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, pelaporan keuangan pemerintahan tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusunannya.

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif, diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai tujuan normative, yang diharapkan dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah. Kepentingan relative antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antar relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antar dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.

2.3.9 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna pelaporan keuangan dalam memahami pelaporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menurut SAP (2004):

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan yang menyajikan laporan kinerja keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset

tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi

yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

2.3.10 Pengukuran dan Pengakuan Pelaporan Keuangan Pemerintah

1. Pengukuran (*measurement*)

Pengukuran (*measurement*) adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan (Suwardjono, 2005). Jumlah rupiah ini akan dicatat sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Metode pengukuran yang dikenal adalah:

- a. *Biaya historis*. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak

- penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.
- b. *Biaya kini (current cost)*. Aktiva dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.
 - c. *Nilai realisasi/penyelesaian (realisable/settlement value)*. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.
 - d. *Nilai sekarang (present value)*. Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

2. Pengakuan (*recognition*)

Pengakuan (*recognition*) adalah pencatatan jumlah rupiah kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam pelaporan keuangan (Suwardjono, 2005). Jadi pengakuan berhubungan dengan apakah suatu transaksi dijurnal atau tidak.

2.4 Lingkup Pelaporan Keuangan Pemerintah

Lingkup pelaporan keuangan Pemerintah versi *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* digambarkan berikut ini:

Gambar 2.3
Lingkup Pelaporan Keuangan Pemerintah Versi GASB

All Information Used to Assess Accountability and Make Resource Allocation, Investment, and Other Decisions				
ALL FINANCIAL REPORTING				
General Purpose External Reporting (Includes Comprehensive Annual Financial Reports, Popular Reports, and other separate reports)				
General Purpose Financial Statements (includes notes to financial statements)	Supplementary Information		Other Types of Financial Reporting (includes budgets, offering statements, Reports to grantor agencies, and so forth)	Other Information
	Reported in Comprehensive Annual Financial Report	Popular Reports And Other Separate Reports		

Sumber: GASB Concept Statement No.2 dalam Martingsih (2008)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pelaporan keuangan pemerintah terdiri dari pelaporan eksternal tujuan umum dan tipe pelaporan keuangan lain. Pelaporan eksternal tujuan umum terdiri dari pelaporan keuangan tujuan umum (termasuk Catatan Atas Laporan Keuangan) dan informasi pelengkap yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahunan komprehensif (*Comprehensive Annual Financial Report*), *popular reports* dan laporan terpisah lain. Sementara itu, tipe pelaporan keuangan lain termasuk anggaran, laporan kepada agen, pemberi bantuan dan sebagainya.

2.4.1 Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia

Tonggak sejarah reformasi di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999. Sebelum era reformasi, pemerintah berdasarkan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharuskan menyusun Perhitungan Anggaran Negara (PAN) selambat-lambatnya dua belas bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan untuk pemerintah daerah wajib membuat Perhitungan Anggaran Daerah (PAD). Dalam UU PAN disebutkan total realisasi pendapatan, belanja, saldo anggaran lebih/saldo anggaran kurang (SAL/SAK) dan lampiran yang memuat mengenai:

1. Perhitungan Anggaran Negara (Gabungan)
2. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rutin
3. Perhitungan Anggaran Pendapatan Pembangunan
4. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin
5. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan tanpa bantuan proyek/teknis
6. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan dengan bantuan proyek/teknis.

Memasuki era reformasi dimana salah satu agendanya adalah otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai implementasi UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pasal 38 PP 105 tahun 2000 disebutkan bahwa Kepala Daerah diharuskan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas: Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah. Sejalan dengan bergulirnya perubahan dalam regulasi keuangan negara yaitu dengan dikeluarkannya paket kebijakan pengelolaan keuangan yang terpadu dan komprehensif (*omnibus regulation*) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan otonomi daerah yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyajian pelaporan akuntabilitas keuangan negara dan daerah juga mengalami perubahan. Ini ditandai dengan dikeluarkannya PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkembangan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Indonesia

Sebelum Reformasi 1999	Era Reformasi	Setelah <i>Omnibus Regulation</i>
1. Perhitungan Anggaran Negara (Gabungan)	1. Laporan Perhitungan APBD	1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rutin	2. Nota Perhitungan APBD	2. Neraca
3. Perhitungan Anggaran Pendapatan Pembangunan	3. Laporan Aliran Kas	3. Laporan Arus Kas
4. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin	4. Neraca Daerah	4. CALK
5. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan tanpa bantuan proyek/teknis		
6. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan dengan bantuan proyek/teknis.		

Sumber: Martiningsih, 2008

2.4.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

Pelaporan keuangan pemerintah Indonesia saat ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 24 tahun 2005. Laporan keuangan pokok terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut (paragraf 14 PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran): Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Pembiayaan Netto serta Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA). Laporan

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Penyajian laporan arus kas dapat dilakukan dengan metode langsung dan metode tidak langsung atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam standar akuntansi pemerintah. Laporan arus kas berguna terutama sebagai:

1. indikator terhadap jumlah arus kas di masa yang akan datang dan menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya;
2. alat pertanggungjawaban dalam pengelolaan kas;
3. media evaluasi bagi pembaca laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pemerintahan dan struktur keuangan yang bersangkutan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

1. Aliran kas dari aktivitas operasi

- a. Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi
- b. Aliran kas masuk dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan:
 - Pendapatan Asli Daerah
 - Pendapatan dari Dana Perimbangan
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- c. Aliran kas keluar dari aktivitas operasi terdiri dari:

- Belanja Administrasi Umum
 - Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik
 - Belanja Transfer
 - Pengeluaran Tidak Terduga
2. Aliran Kas dari Aktivitas Investasi
- a. Aliran kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:
- penjualan investasi jangka panjang (saham, obligasi)
 - penjualan aktiva tetap
- b. Aliran kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:
- belanja modal
 - penyertaan modal
3. Aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana dari hutang dan ekuitas dana
- a. Aliran kas masuk dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
- Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - Transfer dari dana cadangan
 - Penjualan aset daerah yang dipisahkan
 - Penerimaan piutang pajak tahun lalu
- b. Aliran kas keluar dari aktivitas pembiayaan terdiri dari:
- pembayaran pokok pinjaman dan obligasi
 - transfer ke dana cadangan
 - penyertaan modal
 - pembayaran hutang pajak tahun lalu

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan itu sendiri. Penyajian catatan ini dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami secara lebih baik oleh pembaca laporan yang tidak terbatas oleh pembaca tertentu. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahpahaman di antara pembaca laporan karena mungkin saja diantara pembaca yang mempunyai latar belakang yang berbeda dapat menafsirkan pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan dengan persepsinya masing-masing.

Pengguna laporan yang terbiasa dengan laporan keuangan komersial cenderung akan melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Demikian juga dengan pengguna laporan keuangan yang terbiasa dengan orientasi anggaran akan mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi berbasis akrual. Untuk itu diperlukan penjelasan yang bersifat umum yang mengacu pada pos-pos dalam laporan keuangan. Pengungkapan lainnya seperti basis akuntansi yang digunakan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan juga akan membantu pembaca dalam memahami laporan keuangan tersebut. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, informasi yang disajikan dalam catatan tersebut harus mempunyai referensi silang kepada setiap pos yang terdapat dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dan disajikan secara sistematis. Jadi Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelas atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang terdapat dalam laporan keuangan termasuk pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan sebagai syarat bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, misalnya adalah kewajiban kontinjensi (bersyarat) dan komitmen-komitmen lainnya.

Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat berbentuk narasi, bagan, grafik atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas kondisi dan posisi keuangan entitas pemerintahan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan- akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
6. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
7. Daftar dan skedul.

2.4.3 Pelaporan Keuangan Pemerintah di Beberapa Negara

Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis pelaporan keuangan pemerintah, berikut ini disajikan ringkasan jenis pelaporan keuangan pemerintah di negara Kanada dan New Zealand:

Tabel 2.2
Jenis Laporan Keuangan Pemerintah di Negara Kanada Dan New Zealand:

Negara	Jenis Laporan Keuangan	Deskripsi
Kanada	<i>Statement of Transactions</i>	bentuk penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun, sehingga dapat diketahui defisit atau surplusnya. Klasifikasi transaksi: <ul style="list-style-type: none"> - Transaksi Anggaran - Transaksi Non anggaran - Pertukaran valuta asing - Transaksi hutang belum jatuh tempo
	<i>Statement of Revenue Expenditure and Accumulated Deficit</i>	<ul style="list-style-type: none"> - rincian penerimaan pajak dan bukan pajak serta pengeluaran-pengeluaran anggarannya. - akumulasi defisit atau surplus tahunan
	<i>Statement of Assets and Liabilities</i>	saldo kas dan investasi pemerintah, jumlah yang dipinjam dan dipinjamkan oleh pemerintah
	<i>Statement of Changes in Financial Position</i>	perubahan kas pemerintah untuk kegiatan operasi dan investasi serta bagaimana kegiatan tersebut dibelanjai
New Zealand	<i>Statement of Responsibility</i>	<ul style="list-style-type: none"> - pernyataan tanggung jawab Menteri Keuangan atas kepedulian, informasi yang disajikan dan ketaatan laporan keuangan kepada undang-undang - pernyataan tanggung jawab Sekretaris Perbendaharaan atas laporan keuangan dan ketaatan kepada standar akuntansi yang lazim serta system pengawasan intern yang ada

Negara	Jenis Laporan Keuangan	Deskripsi
	<i>Statement of Financial Performance</i>	sumber-sumber pendapatan yang utama, belanja, surplus/defisit kotor, dividen dan pembagian surplus selain dividen, surplus bersih yang dibagikan, dan dana saldo operasi
	<i>Statement of Financial Position</i>	jumlah <i>asset</i> , kewajiban, dan saldo ekuitas dana (akumulasi saldo dana operasi dan cadangan revaluasi, sampai diperoleh saldo ekuitas dana pada akhir tahun anggaran) jumlah <i>asset</i> , kewajiban, dan saldo ekuitas dana (akumulasi saldo dana operasi dan cadangan revaluasi, sampai diperoleh saldo ekuitas dana pada akhir tahun anggaran)
	<i>Statement of Movement in Equity</i>	Perbandingan anggaran dan aktual atas perubahan aktiva bersih atau ekuitas
	<i>Statement of Cash Flow</i>	arus kas dari operasi (pajak langsung dan tidak langsung, denda dan pendapatan lain-lain serta penggunaan kas) ditambah atau dikurangi penerimaan/pengeluaran kas dari investasi dan aktivitas pendanaan
	<i>Statement of Borrowings</i>	1) laporan analisis pinjaman, 2) laporan profil jatuh tempo pinjaman
	<i>Statement of Commitments</i>	Perikatan-perikatan modal dan operasional menurut jenis dan persyaratannya masing-masing
	<i>Statement of Contingent Liabilities</i>	<ul style="list-style-type: none"> - kewajiban kontinjensi yang dapat dikuantifikasikan (kewajiban jaminan, asuransi kerugian dan kewajiban yang berkaitan dengan perselisihan hukum). - kewajiban yang tidak dapat dikuantifikasikan (kewajiban berkaitan dengan komisi bencana alam, kemungkinan kerugian dari badan-badan perwakilan pemerintah)
	<i>Statement of Unappropriated Expenditures and Expenses</i>	pengeluaran atau belanja yang melampaui appropriasi atau tanpa appropriasi dari parlemen
	<i>Statement of Emergency Expenditure or Expenses</i>	pengeluaran untuk keperluan darurat dan bencana, baik untuk yang sudah diappropriasikan maupun yang tidak diappropriasikan oleh parlemen, baik terjadi maupun tidak, harus diungkapkan dalam laporan keuangan
	<i>Statement of Trust Money</i>	posisi keuangan awal dan akhir kontribusi, distribusi, pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh badan-badan perwalian milik pemerintah menurut kelompok kegiatannya.

Negara	Jenis Laporan Keuangan	Deskripsi
	<i>Statement of Accounting Policies</i>	Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
	<i>Notes to the Financial Statement</i>	perkiraan-perkiraan utama dari <ul style="list-style-type: none"> - <i>Statement of Financial Performance</i>, <i>Statement of Financial Position</i>, dan <i>Statement of Cash Flow</i> diuraikan lebih lanjut. - resiko manajemen, kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan dijelaskan secara singkat
	<i>Report of the Audit Office</i>	laporan <i>Comptroller & Auditor General</i> (di Indonesia BPK) mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan - opini dari badan pemeriksa terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan

Sumber: Rasuli (2001) dalam martiningsih, 2008

2.4 Review Penelitian Terdahulu Dan Pengembangan Hipotesis

Pengguna pelaporan keuangan dalam pemerintah adalah sangat beragam, dan pengguna pelaporan tersebut juga memiliki berbagai keinginan dan kepentingan terhadap pelaporan keuangan. Seperti yang diungkapkan oleh Demski (1973) (dalam Patton, 1992) yang dikenal dengan *Impossibility Theorms* yang menyatakan bahwa berbagai pengguna dengan berbagai kepentingannya membutuhkan berbagai jenis pelaporan pemerintah, sehingga menyediakan informasi untuk berbagai kepentingan ini akan sangat sulit. Beberapa penelitian sebelumnya sudah berusaha mengidentifikasi kebutuhan pengguna pelaporan keuangan pemerintah.

Menurut Anthony (1978) dalam Jones & Pendlebury (2000), diikuti oleh Drebin (1981) dan kemudian diikuti oleh Jones (1985) dalam Martiningsih (2008) diikuti oleh Daniels & Daniel (1991), diikuti oleh *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study No. 1* (1991), Mack & Rian (2006), IPSAS (2007) dan Martiningsih (2008), informasi kondisi keuangan dibutuhkan didalam pelaporan keuangan pemerintahan, sehingga hipotesis yang penulis ajukan adalah:

H1.1 = informasi kondisi keuangan dibutuhkan investor dan kreditor dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Drebin (1981) dalam Martiningsih (2008) diikuti oleh Daniels & Daniel (1991), dan IPSAS (2007), informasi kondisi ekonomi dibutuhkan didalam pelaporan keuangan pemerintahan, sehingga hipotesis yang penulis ajukan adalah:

H1.2 = informasi kondisi ekonomi dibutuhkan investor dan kreditor dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Anthony (1978) dalam Jones & Pendlebury (2000), diikuti oleh Drebin (1981) dan diikuti oleh Jones (1985) dalam Martiningsih (2008), diikuti oleh Daniels & Daniel (1991), diikuti oleh *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study No. 1* (1991), Mack & Rian (2006), IPSAS (2007) dan Martiningsih (2008), informasi kepatuhan terhadap aturan dibutuhkan didalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis yang penulis ajukan adalah:

H1.3 = informasi kepatuhan terhadap aturan dibutuhkan investor dan kreditor dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Anthony (1978) dalam Jones & Pendlebury (2000), diikuti oleh Drebin (1981) dan oleh Jones (1985) dalam Martiningsih (2008), *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study No. 1* (1991), Mack & Rian (2006), IPSAS (2007) dan Martiningsih (2008) informasi kinerja dibutuhkan didalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis yang penulis ajukan adalah:

H1.4 = informasi kinerja dibutuhkan investor dan kreditor dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Drebin (1981) dan diikuti oleh Jones (1985) dalam Martiningsih (2008) diikuti oleh Daniels & Daniel (1991), diikuti oleh *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study No. 1* (1991), Mack & Rian (2006), IPSAS (2007) dan Martiningsih (2008) informasi perencanaan dan penganggaran dibutuhkan didalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis yang penulis ajukan adalah:

H1.5 = informasi perencanaan dan penganggaran dibutuhkan investor dan kreditor dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Mack & Rian (2006) dan Martiningsih (2008) informasi Naratif dibutuhkan didalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis yang penulis ajukan adalah:

H1.6 = informasi naratif dibutuhkan investor dan kreditor dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah

Daniels & Daniels (1991), Yuliarni (2003) dan Martingsih (2008) tentang ketidak sesuaian informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan kebutuhan penggunaanya, maka hipotesis untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu apakah aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah telah sesuai kebutuhan pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah:

H2 = aturan mengenai pelaporan keuangan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor atas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Latar belakang pendidikan dan tingkat pendidikan juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi pengguna pelaporan keuangan pemerintah oleh masyarakat (Martiningsih, 2008). Senada dengan Martiningsih, Fotanella (2010) juga menyatakan tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, mempengaruhi kebutuhan informasi pengguna pelaporan keuangan pemerintahan. Maka hipotesis untuk menjawab rumusan masalah ke tiga yaitu apakah tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mempunyai pengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah:

H3.1 = tingkat pendidikan investor dan kreditor mempengaruhi kebutuhan investor dan kreditor terhadap informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

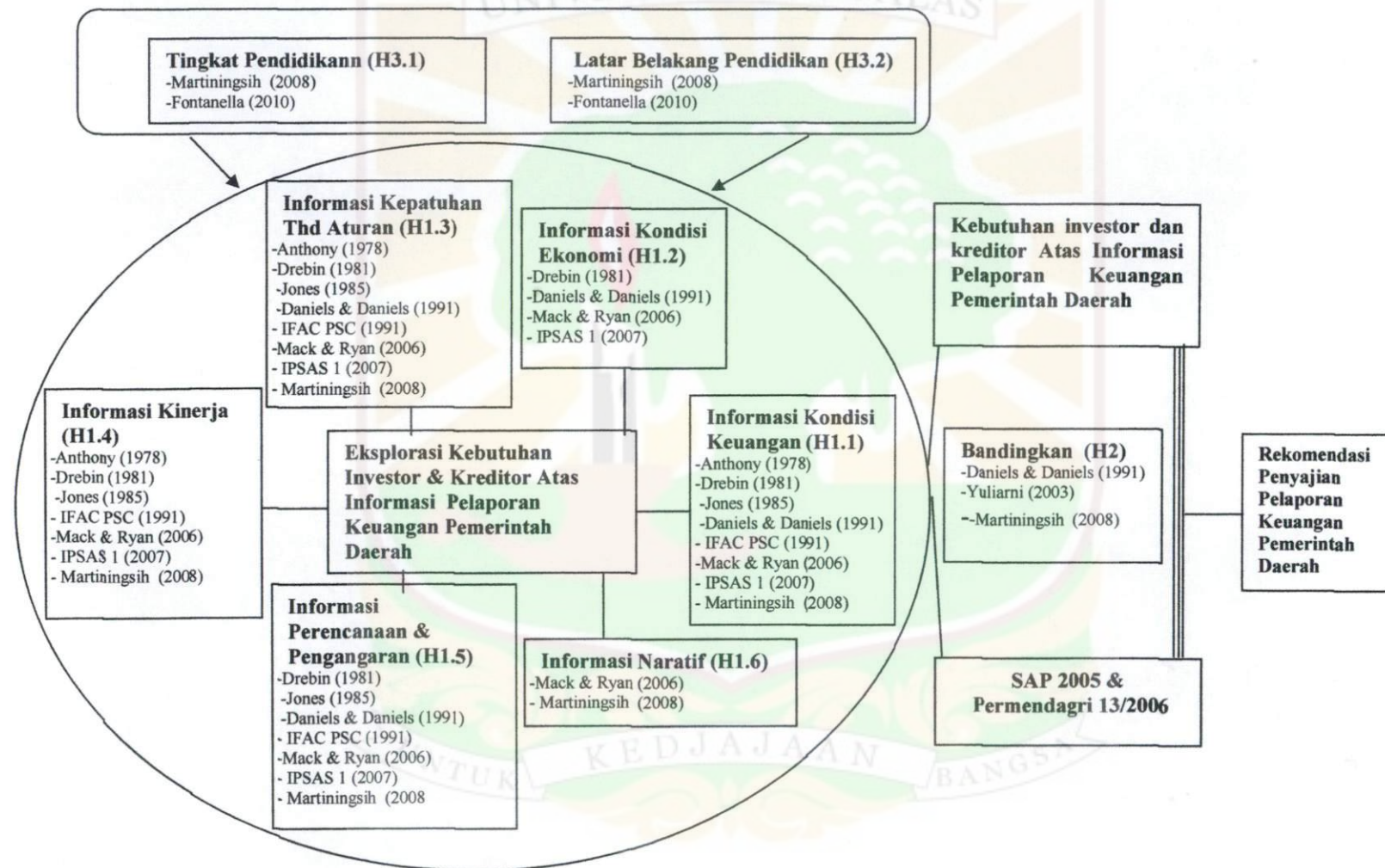
H3.2 = latar belakang pendidikan investor dan kreditor mempengaruhi kebutuhan investor dan kreditor terhadap informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.5 Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kebutuhan investor dan kreditor terhadap informasi yang terdapat didalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Setelah dapat diidentifikasi kebutuhan investor dan kreditor terhadap informasi yang terdapat didalam pelaporan keuangan pemerintah daerah maka akan dilakukan konten analisis untuk melihat kesesuaian antara kebutuhan investor dan kreditor atas informasi pelaporan keuangan pemerintah dengan aturan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan dan permendagri nomor 13 tahun 2006. Sebagai analisis tambahan kemudian dilihat pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan dengan kebutuhan investor dan kreditor atas informasi yang terdapat didalam pelaporan keuangan pemerintah. Diakhir penelitian ini peneliti akan memberikan rekomendasi penyajian pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan kebutuhan investor dan kreditor. Agar lebih jelas, maka model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.4
Model Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan populasi dan responden penelitian, jenis data, instrumen pengumpulan data, definisi operasional dan metode penelitian.

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Sedangkan menurut Sekaran (2006) populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Investor dan kreditor sebagai salah satu kelompok pengguna utama laporan keuangan pemerintahan (KKSAP paragraf 16).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2008). Sedangkan menurut Sekaran (2006), sampel adalah subset atau sub kelompok populasi. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah oleh pimpinan perusahaan kategori menengah dan besar yang mewakili investor dan pimpinan bank yang mewakili kreditor, karena pimpinan perusahaan dan pimpinan bank sebagai bagian dari top manajemen menjalankan fungsi perencanaan, manajerial dan pengambilan keputusan. Sehingga untuk mengeksplorasi yang kebutuhan investor dan kreditor atas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat direpresentasikan oleh pimpinan perusahaan dan pimpinan bank. Sampel yang ada dalam penelitian ini adalah pimpinan perusahaan kategori menengah dan besar yang ada di kota Padang (BPS, dan 27 pimpinan bank umum cabang nasional, maupun bank umum yang pusatnya di daerah (BPD) yang ada di kota Padang (Bank Indonesia Padang, 2008). Alasan pengambilan sampel pimpinan perusahaan kategori besar dan pimpinan bank yang ada di kota Padang adalah karena sebahagian besar perusahaan kategori menengah dan besar di Sumatera Barat mempunyai kantor pusat ataupun cabang di kota Padang dan demikian juga dengan bank nasional semuanya mempunyai cabang di kota Padang, jadi dengan mengambil responden pimpinan perusahaan

kategori menengah dan besar serta pimpinan bank yang ada di kota Padang bisa mewakili investor dan kreditor di daerah Sumatera Barat.

3.2 Sumber Data dan Desain Instrumen Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder, berupa literatur review dan dokumen review. Dokumen review berupa profil wilayah, data investasi, Laporan perekonomian, dan Laporan Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dan melalui email.

3.2.2 Desain Instrumen Penelitian

Kuesioner yang diberikan berisi tiga hal utama yaitu karakteristik dari responden, pertanyaan yang bersifat terbuka untuk melihat apakah responden sudah mengguna pelaporan keuangan untuk pembuatan keputusan dan pertanyaan tertutup untuk mengidentifikasi kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan-pernyataan untuk mengidentifikasi kebutuhan investor dan kreditor atas informasi atas pelaporan keuangan pemerintah daerah semuanya bersifat positif dengan pengukuran menggunakan skala Likert.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari hasil penelitian Martiningsih (2008) yang dikembangkannya dari penelitian Anthony (1978), Drebin et. al (1981), Jones (1985), Daniels & Daniels (1991), *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study 1* (1991), Mack & Ryan (2006), dan *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) No. 1* (2007). Pengembangan kebutuhan pengguna yang ada dalam penelitian terdahulu didasarkan pada tujuan pelaporan keuangan pemerintahan yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat untuk menilai dan memprediksi kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap aturan, kinerja operasional, perencanaan dan penganggaran, serta informasi naratif.

Instrumen ini kemudian dikembangkan sendiri oleh peneliti menjadi 43 pernyataan dalam kuesioner penelitian seperti dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Variabel Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jenis Informasi	Jumlah Butir Pertanyaan	No Butir pada Instrumen
Kondisi keuangan	8	1-8
Kondisi ekonomi	9	9-17
Kepatuhan terhadap aturan	4	18-21
Kinerja	5	22-26
Perencanaan dan penganggaran	6	27-32
Naratif	11	33-43
Jumlah		

Sumber: Lampiran 1

3.3 Definisi Operasional

Berikut ini adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara. FASB mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian (*means of communication*) informasi tentang segala kondisi dan kinerja entitas terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan (Suwardjono, 2006).
2. Investasi merupakan kegiatan untuk mentransformasikan sumber daya potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah diolah dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara adil dan merata (Sarana, 2010).
3. Yang dimaksud dengan Investor dalam penelitian ini, adalah orang atau organisasi yang menanamkan waktu dan modalnya disuatu daerah atau untuk menjalankan usaha didaerah tersebut (osborne, 2005), atau orang

atan organisasi yang akan menanamkan waktu dan modalnya di daerah (calon investor)

4. Yang dimaksud dengan kreditor dalam penelitian ini, adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih dan atau yang akan memiliki hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang yang hak tersebut timbul semata-mata dari perjanjian utang-piutang dengan pemerintah daerah (Pardede, 2005).
5. Informasi kondisi keuangan, yaitu informasi yang bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi aliran, posisi keuangan dan perubahannya, hasil operasional serta kebutuhan sumber keuangan unit pemerintah daerah (Martiningsih, 2008).
6. Informasi kondisi ekonomi, yaitu informasi untuk menentukan dan memprediksi kondisi unit pemerintah daerah dan perubahan di dalamnya (Martiningsih, 2008).
7. Informasi kepatuhan terhadap aturan, yaitu informasi yang bermanfaat untuk memonitor kontribusi dan penggunaan sumber daya, perbandingan anggaran dengan aktual apakah sesuai aturan yang berlaku (Martiningsih, 2008).
8. Informasi kinerja, yaitu informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Martiningsih, 2008).
9. Informasi perencanaan dan penganggaran, yaitu informasi yang bermanfaat untuk perencanaan dan penganggaran aktivitas dan program pemerintah daerah (Martiningsih, 2008).
10. Informasi naratif, yaitu informasi yang berisi *overview* operasi pemerintah, deskripsi sebelum laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban kepala pemerintahan serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Martiningsih, 2008).

3.4 Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel-variabel kebutuhan investor dan kreditor atas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dibagi atas 6 subvariabel diukur dengan skala

Likert dengan skor 1 (tidak penting), 2 (kurang penting), 3 (cukup penting), 4 (penting) dan 5 (sangat penting).

Hipotesis ke-2 penulis adalah bahwa aturan mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu PP 24 tahun 2005 dan permendagri 13 tahun 2006 tidak sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Untuk pengambilan kesimpulan hipotesis ini akan digunakan pengukuran sebagai berikut:

1. Jika informasi yang dibutuhkan investor dan kreditor tersebut tidak tercantum dalam kedua aturan tersebut maka akan diberi skor 1 (satu)
2. Jika informasi yang dibutuhkan investor dan kreditor tersebut tercantum dalam salah satu aturan tetapi tidak diwajibkan maka akan diberi skor 2 (dua)
3. Jika informasi yang dibutuhkan investor dan kreditor tersebut tercantum dalam kedua aturan tersebut tetapi tidak diwajibkan atau hanya tercantum dalam satu aturan saja dan diwajibkan maka akan diberi skor 3 (tiga)
4. Jika informasi yang dibutuhkan investor dan kreditor tersebut tercantum dalam kedua aturan tersebut tetapi hanya satu aturan yang mewajibkannya maka akan diberi skor 4 (empat)
5. Jika informasi yang dibutuhkan investor dan kreditor tersebut tercantum dalam kedua aturan tersebut dan diwajibkan pada kedua aturan tersebut maka akan diberi skor 5 (lima)

Berdasarkan Hipotesis ketiga penulis, kebutuhan informasi investor dan kreditor atas pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pendidikan dan latar belakang pendidikan. Sehingga variabel bebas (*independent variable*) penelitian ini adalah pendidikan dan latar belakang pendidikan. Sedangkan variabel terikat (*dependent variable*) adalah kebutuhan investor atas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dibagi atas 6 subvariabel diatas. Pengukuran variabel independen untuk tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: SMA/ sederajat, D3/akademi, S1 dan S2. Untuk masing-masing tingkat pendidikan ini diberikan poin berdasarkan lama studi, dimana SMA/ sederajat diberi poin 12 (dua belas), D3/akademi diberi poin 15 (lima belas), S1 diberi poin 17 (tujuh

belas) dan S2 diberi poin 19 (sembilan belas). Sedangkan untuk latar belakang pendidikan terbagi atas 2, yaitu non akuntansi dan akuntansi. Untuk yang latar belakang pendidikannya non-akuntansi diberi poin 1(satu) sedangkan yang latar belakang pendidikannya akuntansi diberi poin 2 (dua).

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Bila data tidak normal, maka teknik statistik parametris tidak dapat digunakan untuk alat analisis dan sebagai gantinya digunakan teknik statistik lain yaitu statistik nonparametris (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan teknik *kolmogorov-smirnov* menggunakan program SPSS. Hipotesis untuk pengujian ini adalah sebagai berikut:

Ho: Data berasal dari populasi yang terdistribusi secara normal

H1: Data berasal dari populasi yang tidak terdistribusi secara normal

Kriteria:

Jika P-Value $< \alpha$ (0,05), maka tolak Ho

Jika P-Value $\geq \alpha$ (0,05), maka terima Ho

3.5.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Sebelum dilakukan pengolahan data, terlebih dahulu dilakukan *validitas* dan *reliability test* atas data tersebut. Uji ini dilakukan untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan pengukuran. Validitas dalam riset menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2004). Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk (*construct validity*) yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor total. Teknik yang digunakan adalah dengan *pearson product-moment*. Instrumen valid jika memiliki nilai *pearson product-moment* besar dari 0,4 (Sujianto, 2007).

Reliabilitas suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukur (Sekaran, 2003). Reliabilitas menunjukkan akurasi dari pengukurnya (Jogiyanto, 2004). Untuk penelitian ini digunakan pendekatan konsistensi internal. Teknik yang dipakai adalah *Cronbach Alpha*. Instrumen dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6.

3.5.3 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif bertujuan untuk menggambarkan masing-masing variabel secara mandiri. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan pertanyaan penelitian. Untuk menganalisis data tersebut digunakan teknik persentase dari frekuensi dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P = Persentase yang dicari
F = Frekuensi/ Jumlah skor
N = Jumlah responden

$$\text{Rerata} = \frac{(SPX5) + (PX4) + (CPX3) + (KPX2) + (TPX1)}{n}$$

Dimana: SP = Sangat Penting
P = Penting
CP = Cukup Penting
KP = Kurang Penting
TP = Tidak Penting

Untuk mengetahui tingkat pencapaian rata-rata (TCR) responden pada variabel penelitian digunakan formula Riduwan (2008) sebagai berikut:

$$P = \frac{X}{N} \times 100\%$$

Dimana : P = persentase tingkat capaian variabel
X = skor rata-rata
N = jumlah skor maksimal

Dengan kriteria capaian sebagai berikut:

Sangat Penting	: jika jawaban responden mencapai skor 84-100%
Penting	: jika jawaban responden mencapai skor 68-83%
Cukup Penting	: jika jawaban responden mencapai skor 52-67%
Kurang Penting	: jika jawaban responden mencapai skor 36-51%
Tidak Penting	: jika jawaban responden mencapai skor 20-35%

Responden dianggap membutuhkan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah bila nilai TCR lebih besar dan sama dengan 68%. Bentuk uji hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah:

Ho : TCR < 68%

H1 : TCR ≥ 68%

Kriteria untuk menolak atau menerima Ho berdasarkan nilai TCR adalah:

Jika TCR ≥ 68% : tolak Ho

Jika TCR < 68% : terima Ho

3.5.4 Analisis Kesesuaian Aturan Pelaporan Keuangan Pemerintah dengan Kebutuhan Pengguna Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peneliti akan melakukan *content analysis* terhadap aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu PP No. 24 Tahun 2005 terutama PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan serta Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan menganalisis apakah aturan tersebut sudah mengatur sama seperti kebutuhan informasi pengguna. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan formula Riduwan (2008) sebagai berikut:

$$P = \frac{X}{N} \times 100\%$$

Dimana : P = persentase tingkat capaian variabel (TCR)

X = skor

N = jumlah skor maksimal

Dengan kriteria capaian sebagai berikut:

Sangat Tidak Sesuai : jika mencapai skor 20%-35%

Tidak sesuai : jika mencapai skor 36%-51%

Kurang Sesuai	: jika mencapai skor 52%-67%
Sesuai	: jika mencapai skor 68%-83%
Sangat Sesuai	: jika mencapai skor 84%-100%

Aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah dianggap sesuai dengan kebutuhan informasi investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, bila nilai TCR lebih besar dan sama dengan 68%. Bentuk uji hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah:

H_1 : $TCR < 68\%$

H_0 : $TCR \geq 68\%$

Kriteria untuk menolak atau menerima H_0 berdasarkan nilai TCR adalah:

Jika $TCR \geq 68\%$: terima H_0

Jika $TCR < 68\%$: tolak H_0

3.5.5 Pengujian Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Latar Belakang Pendidikan Responden Terhadap Masing-Masing Variabel Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian ini merupakan analisis tambahan yang dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Tingkat Pendidikan dan Latar Belakang Pendidikan responden terhadap kebutuhan mereka atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah dengan menggunakan *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA). MANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen kategorikal terhadap variabel dependen metrik (Ghazali, 2005). Bentuk hipotesis untuk penelitian ini adalah:

Hipotesis : H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ (tidak ada perbedaan)

H_a : $\mu_1 \neq \mu_2 \neq \dots \neq \mu_k$ (ada perbedaan)

Sedangkan penentuan *decision rule* adalah:

Jika $\rho < \alpha$, H_0 ditolak

Jika $\rho > \alpha$, H_0 tidak ditolak

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Profil Responden

Responden yang ada dalam penelitian ini adalah pimpinan perusahaan kategori besar dan menengah yang ada di kota Padang dan pimpinan bank umum cabang nasional, maupun bank umum yang pusatnya di daerah (BPD) yang ada di kota Padang. Pengumpulan data kuesioner dari responden dilakukan selama 3 bulan yang disebar secara langsung dan melalui email.

Tabel 4.1
Response Rate Responden

Uraian	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	175	100%
Kuesioner yang kembali	80	46%
Kuesioner yang kembali, tapi tidak dapat diolah	17	10%
Kuesioner yang dapat dianalisis	63	36%

Sumber: data primer diolah

Dari 175 kuesioner yang disebar kepada responden, sebanyak 80 (46%) kuesioner diterima kembali dan sebanyak 17 (10%) kuesioner tidak dapat diolah, sehingga kuesioner yang dapat dianalisis sebanyak 63 (36%). Responden dalam penelitian ini dibedakan menurut tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan. Berikut ini adalah profil responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMU/Sederajat	11	17,5 %
Diploma	9	12,7 %
Sarjana	33	54,0 %
Pasca Sarjana	10	15,9 %
Total	63	100 %

Sumber: data primer diolah

Tabel 4.5
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Pria	53	84,1%
Wanita	10	15,9%
TOTAL	63	100 %

Sumber: data primer diolah

Dari tabel responden berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa responden dengan jenis kelamin pria lebih banyak dari yang berjenis kelamin wanita, dimana responden pria sebanyak 53 orang (84,1%) sedangkan responden wanita sebanyak 10 orang (15,9%).

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Pengujian Asumsi Normalitas Data

Berikut adalah hasil pengujian normalitas data untuk tiap-tiap variabel dalam penelitian.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Normalitas Data

Variabel	Asymp Sig (2-Tailed)
Kondisi Keuangan	0,213
Kondisi Ekonomi	0,226
Kepatuhan Terhadap Aturan	0,161
Kinerja	0,120
Perencanaan dan Penganggaran	0,113
Naratif	0,152

Sumber : Lampiran 3

Dari hasil uji normalitas diatas, dapat diketahui bahwa data yang diperoleh memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai Asymp Sig. (2-tailed) yang nilainya lebih dari 0,05. Hasil pengujian normalitas data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3.

4.2.2 Hasil Pengujian Validitas

Validitas dalam riset menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2004). Pengujian

validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk (*construct validity*) yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor total. Teknik yang digunakan adalah dengan *pearson product-moment*. Berikut adalah hasil pengujian validitas yang diperoleh melalui program SPSS Versi 16.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kondisi Keuangan

Instrumen Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Ket
1	0.871	0.000	Valid
2	0.807	0.000	Valid
3	0.809	0.000	Valid
4	0.880	0.000	Valid
5	0.820	0.000	Valid
6	0.849	0.000	Valid
7	0.848	0.000	Valid
8	0.812	0.000	Valid

Sumber: Lampiran 4

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kondisi Ekonomi

Instrumen Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Ket
1	0.834	0.000	Valid
2	0.863	0.000	Valid
3	0.883	0.000	Valid
4	0.734	0.000	Valid
5	0.847	0.000	Valid
6	0.667	0.000	Valid
7	0.848	0.000	Valid
8	0.858	0.000	Valid
9	0.873	0.000	Valid

Sumber: Lampiran 4

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Terhadap Aturan

Instrumen Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Ket
1	0.836	0.000	Valid
2	0.854	0.000	Valid
3	0.917	0.000	Valid
4	0.852	0.000	Valid

Sumber: Lampiran 4

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kinerja

Instrumen Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Ket
1	0.810	0.000	Valid
2	0.733	0.000	Valid
3	0.899	0.000	Valid
4	0.936	0.000	Valid
5	0.892	0.000	Valid

Sumber: Lampiran 4

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Validitas Variabel Perencanaan dan Penganggaran

Instrumen Item Pernyataan	Koefisien Korelasi Pearson	Sig.	Ket
1	0.868	0.000	Valid
2	0.874	0.000	Valid
3	0.844	0.000	Valid
4	0.936	0.000	Valid
5	0.875	0.000	Valid
6	0.844	0.000	Valid

Sumber: Lampiran 4

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Validitas Variabel Naratif

Instrumen Item Pernyataan	<i>pearson product-moment</i>	Sig.	Ket
1	0.640	0.000	Valid
2	0.710	0.000	Valid
3	0.808	0.000	Valid
4	0.827	0.000	Valid
5	0.687	0.000	Valid
6	0.736	0.000	Valid
7	0.732	0.000	Valid
8	0.820	0.000	Valid
9	0.848	0.000	Valid
10	0.841	0.000	Valid
11	0.843	0.000	Valid

Sumber: Lampiran 4

Menurut Sujianto (2007), Instrumen valid jika memiliki nilai *pearson product-moment* besar dari 0,4. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua item pernyataan adalah valid karena nilai *pearson product-moment* lebih besar dari 0,4 dengan tingkat keyakinan 95% atau signifikansi 5%.

4.2.3 Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukur (Sekaran, 2003). Reliabilitas menunjukkan akurasi dari pengukurnya (Jogiyanto, 2004). Untuk penelitian ini digunakan pendekatan konsistensi internal. Teknik yang dipakai adalah *Cronbach Alpha*. Instrumen dikatakan *reliable* jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 (Gazali, 2006). Berikut ini disajikan hasil uji reliabilitas.

Tabel 4.13
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach Alpha
Kondisi Keuangan	0.940
Kondisi Ekonomi	0.939
Kepatuhan Terhadap Aturan	0.888
Kinerja	0.907
Perencanaan dan Penganggaran	0.936
Naratif	0.931

Sumber: Lampiran 5

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil pengujian realibilitas menunjukkan angka *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari batas yang ditentukan Nunnaly dalam Ghozali (2006) yaitu 0,60. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang ada dalam penelitian ini bersifat *reliable*.

4.3 Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Dari pertanyaan poin B apakah responden sudah menggunakan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan berinvestasi didaerah maupun pada berinvestasi pada proyek pemerintah responden yang sudah menggunakan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk pengambilan keputusan hanya 21 orang (33%), sedangkan sebanyak 42 orang (67%) belum menggunakan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan. Ringkasan jawaban responden atas pertanyaan pada poin B dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.14
Distribusi Frekuensi Responden yang Sudah Menggunakan Pelaporan Keuangan Pemerintah Dalam Pengambilan Keputusan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Sudah menggunakan	21	33%
2	Belum menggunakan	42	67%
Total		63	100%

Sumber: data primer diolah

Dari jawaban responden dapat diketahui bahwa sebahagian besar responden tidak menggunakan informasi yang ada pelaporan keuangan pemerintah daerah karena menurut sebahagian besar responden adalah karena sulitnya memperoleh pelaporan keuangan pemerintah daerah, bahkan sebahagian besar dari responden tidak mengetahui bahwa pemerintah wajib untuk menyampaikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat seperti kewajiban pemerintah untuk menyampaikan pelaporan keuangan kepada dewan perwakilan rakyat.

Dari pertanyaan point C tentang informasi yang dibutuhkan oleh responden, diperoleh urutan informasi yang diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan derajat kepentingan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Tingkat Capaian Rata-Rata Jawaban Investor dan Kreditor
Atas Kebutuhan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ranking	Variable	Rerata	TCR
1	Perencanaan dan Penganggaran	4,00	80,00%
2	Naratif	3,99	79,89%
3	Kondisi Keuangan	3,97	79,40%
4	Kinerja	3,97	79,39%
5	Kondisi Ekonomi	3,93	78,87%
6	Kepatuhan Terhadap Aturan	3,76	75,16%
Rata-Rata		3,99	79,89%

Sumber: Lampiran 6

Dari tabel 4.15 diperoleh informasi bahwa variabel informasi perencanaan dan penganggaran menempati posisi paling utama sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh investor dan kreditor. Kemudian diikuti oleh variabel informasi naratif menempati posisi ke-2 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh investor dan kreditor. Diikuti oleh variabel informasi kondisi keuangan menempati posisi ke-3 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh investor dan kreditor. Kemudian diikuti oleh variabel informasi kinerja menempati posisi ke-4 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh investor dan

kreditor. kemudian diikuti oleh variabel informasi kondisi ekonomi menempati posisi ke-5 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh investor dan kreditor dan variabel informasi kepatuhan terhadap aturan menempati posisi ke-6 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah oleh investor dan kreditor.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa, semua hipotesis pertama terdukung, karena tingkat capaian masing-masing variabel lebih besar dari 68%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Analisis Deskriptif Jawaban Responden

Hipotesis	H1	TCR	Keputusan
Hipotesis 1.1	TCR1 \geq 68%	79,40 %	Tolak Ho
Hipotesis 1.2	TCR2 \geq 68%	78,87%	Tolak Ho
Hipotesis 1.3	TCR3 \geq 68%	75,16%	Tolak Ho
Hipotesis 1.4	TCR4 \geq 68%	79,39%	Tolak Ho
Hipotesis 1.5	TCR5 \geq 68%	80,00%	Tolak Ho
Hipotesis 1.6	TCR6 \geq 68%	79,89%	Tolak Ho

Sumber: Lampiran 6

Hipotesis 1.1 menyatakan bahwa informasi kondisi keuangan diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, didukung hasilnya dengan nilai TCR sebesar 79,40%, artinya informasi kondisi keuangan dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anthony (1978) dalam Jones & Pendlebury (2000), diikuti oleh Drebin (1981), diikuti oleh Jones (1985) dalam Martiningsih (2008) diikuti oleh Daniels & Daniel (1991), *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study No. 1* (1991), Mack & Rian (2006), IPSAS (2007) dan Martiningsih (2008).

Hipotesis 1.2 menyatakan bahwa informasi kondisi ekonomi dibutuhkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, didukung hasilnya dengan nilai TCR sebesar 78,87%, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa hipotesis alternatif dapat diterima, yang artinya variabel kondisi ekonomi diperlukan dalam laporan keuangan pemerintah.

Hipotesis 1.3 menyatakan bahwa informasi kepatuhan terhadap aturan diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung hasilnya dengan nilai TCR sebesar 75,16%. Sehingga informasi kepatuhan terhadap aturan dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Anthony (1978) dalam Jones & Pendlebury (2000), diikuti oleh Drebin (1981) dan diikuti oleh Jones (1985), diikuti oleh Daniels & Daniel (1991), *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study No. 1* (1991), Mack & Rian (2006), IPSAS (2007) dan Martiningsih (2008).

Untuk hipotesis 1.4 yaitu yang menyatakan bahwa informasi kinerja diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, didukung hasilnya dengan nilai TCR sebesar 79,39%. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Anthony (1978), diikuti oleh Drebin (1981) dan oleh Jones (1985), *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study No. 1* (1991), Mack & Rian (2006), IPSAS (2007) dan Martiningsih (2008) bahwa, informasi kinerja diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 1.5 menyatakan bahwa informasi perencanaan dan penganggaran diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, didukung hasilnya dengan nilai TCR sebesar 80,00%. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Drebin (1981), diikuti oleh Jones (1985) dalam Martiningsih (2008) diikuti oleh Daniels & Daniel (1991), *International Federation of Accountants (IFAC) Public Sector Committee (PSC) Study No. 1* (1991), Mack & Rian (2006), IPSAS (2007) dan Martiningsih (2008) bahwa informasi perencanaan dan penganggaran diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 1.6 yang menyatakan bahwa informasi naratif diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, didukung hasilnya dengan nilai TCR sebesar 79,89%. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Mack & Rian (2006) dan Martiningsih (2008), bahwa informasi naratif diperlukan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa didalam pelaporan keuangan pemerintah daerah diperlukan informasi kondisi

keuangan, informasi kondisi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan penganggaran, serta informasi naratif.

Dari seluruh informasi yang dibutuhkan oleh investor dan kreditor berikut ini akan diuraikan 10 informasi yang paling dibutuhkan oleh investor dan kreditor dari 43 informasi yang dibutuhkannya.

Tabel 4.17
Informasi Yang Paling Dibutuhkan Oleh Investor Dan Kreditor

No	Keterangan	Rata-Rata	TCR
1	Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor impor	4,33	86,54%
2	Potensi unggulan daerah	4,27	85,40%
3	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah, seperti: Pelayanan perizinan dan tarifnya	4,24	84,87%
4	Ketersediaan infrastruktur	4,24	84,76%
5	Stabilitas keamanan	4,22	84,44%
6	Stabilitas politik	4,21	84,13%
7	Perencanaan pemerintah 5 tahun ke depan	4,17	83,49%
8	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah	4,16	83,17%
9	<i>Trend</i> ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang	4,16	83,17%
10	Kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang	4,13	82,54%

Sumber: lampiran 6

Pada bagian berikut ini akan diuraikan informasi yang dibutuh oleh investor dan kreditor secara terpisah.

Tabel 4.18
Tingkat Capaian Rata-Rata Jawaban Investor
Atas Kebutuhan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Informasi	Rerata	TCR
1	Perencanaan dan penganggaran	3,97	79,30%
2	Naratif	3,93	78,61%
3	Ekonomi	3,90	78,04%
4	Kinerja	3,89	77,83%
5	Kondisi keuangan	3,83	76,51%
6	Kepatuhan Terhadap aturan	3,72	74,30%
Rata-Rata		3,87	77,43%

Sumber: Lapidan 6

Dari tabel 4.18 diperoleh informasi bahwa variabel informasi Perencanaan dan penganggaran menempati posisi paling utama sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh investor. Kemudian diikuti oleh variabel informasi naratif menempati posisi ke-2 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah oleh investor. Setelah itu diikuti oleh variabel informasi kondisi ekonomi menempati posisi ke-3 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh investor. Kemudian diikuti oleh variabel informasi kinerja menempati posisi ke-4 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh investor dan kreditor, diikuti oleh variabel informasi kondisi keuangan menempati posisi ke-5 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh investor, dan variabel informasi kepatuhan terhadap aturan menempati posisi ke-6 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh investor.

Tabel 4.19
Tingkat Capaian Rata-Rata Jawaban Kreditor
Atas Kebutuhan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Informasi	Rerata	TCR
1	Kondisi Keuangan	4,28	85,63%
2	Naratif	4,13	82,65%
3	Kinerja	4,14	82,73%
4	Perencanaan dan penganggaran	4,08	81,50%
5	Ekonomi	3,99	79,11%
6	Kepatuhan terhadap Aturan	3,85	77,00%
Rata-Rata		4,08	81,44%

Sumber: Lapidan 6

Dari tabel 4.19 diperoleh informasi bahwa variabel informasi keuangan menempati posisi paling utama sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh kreditor. Kemudian diikuti oleh variabel informasi naratif menempati posisi ke-2 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah oleh kreditor. Lalu diikuti oleh variabel informasi kondisi kinerja menempati posisi ke-3 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh kreditor. Setelah itu diikuti oleh variabel informasi Perencanaan dan penganggaran menempati posisi ke-4 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh kreditor. Kemudian diikuti oleh variabel informasi kondisi ekonomi menempati posisi ke-5 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh kreditor dan variabel informasi kepatuhan terhadap aturan menempati posisi ke-6 sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah oleh kreditor.

Pada bagian berikut juga akan dibahas 10 informasi yang paling dibutuhkan oleh investor dari 43 informasi yang dibutuhkannya.

Tabel 4.20
Informasi yang Paling di Butuhkan Oleh Investor

No	Keterangan	Rata-Rata	TCR
1	Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor impor	4,33	86,51%
2	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemda, seperti: Pelayanan perizinan dan tarifnya	4,27	85,43%
3	Potensi unggulan daerah	4,23	84,65%
4	Stabilitas politik	4,23	84,65%
5	Ketersediaan infrastruktur	4,21	84,19%
6	Stabilitas keamanan	4,21	84,19%
7	Perencanaan pemda 5 tahun ke depan	4,16	83,26%
8	Perencanaan alokasi sumber jasa yang dikelola pemerintah	4,14	82,79%
9	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda	4,09	81,86%
10	<i>Trend</i> ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang	4,05	80,93%

Sumber: Lahiran 6

Berdasarkan data dalam tabel 4.20 informasi yang sangat dibutuhkan oleh investor secara berurutan adalah: kebijakan pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor dan impor, evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah daerah, seperti: pelayanan perizinan dan tarifnya, potensi unggulan daerah, stabilitas politik, ketersediaan infrastruktur, stabilitas keamanan, perencanaan pemda 5 tahun ke depan, perencanaan alokasi sumber jasa yang dikelola pemerintah, prediksi pertumbuhan pendapatan pemda serta *trend* ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang. Sedangkan informasi yang paling dibutuhkan oleh kreditor dapat dilihat pada tabel 4.21.

Tabel 4.21
Informasi yang Paling di Butuhkan Oleh Kreditor

No	Keterangan	Rata-Rata	TCR
1	Kemampuan pemda untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang	4,65	0,93
2	Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)	4,50	0,90
3	Rincian dan analisis jumlah hutang pemda	4,45	0,89
4	Potensi unggulan daerah	4,35	0,87
5	Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor impor	4,33	0,87
6	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda	4,30	0,86
7	Prediksi pertumbuhan perekonomian pemda	4,30	0,86
8	Perbandingan kinerja keuangan pemda tahun ini dengan tahun sebelumnya	4,30	0,86
9	Laporan pertanggungjawaban kepala pemda	4,30	0,86
10	Ketersediaan infrastruktur	4,30	0,86

Sumber: Lapidan 6

Berdasarkan data pada tabel 4.21 informasi yang paling dibutuhkan oleh kreditor adalah: informasi tentang kemampuan pemda untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, informasi tentang Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar, Rincian dan analisis jumlah hutang pemda, Potensi unggulan daerah, Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor impor, Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda, Prediksi pertumbuhan ekonomi pemda, Perbandingan kinerja keuangan pemda tahun ini dengan tahun sebelumnya, Laporan pertanggungjawaban kepala pemda serta informasi tentang Ketersediaan infrastruktur.

4.4 Perbandingan Kesesuaian Aturan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Dengan Kebutuhan Investor Dan Kreditor Atas Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut ini adalah perbandingan kesesuaian kebutuhan informasi pengguna pelaporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil empiris dengan aturan pelaporan keuangan pemerintah yaitu PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006:

Tabel 4.22
Kesesuaian PP No. 24 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006
Dengan Kebutuhan Investor dan Kreditor Atas Informasi dalam Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

No	Jenis Informasi	Hasil Empiris	PP No. 24/2005	Permendagri 13/2006	Skor	TCR (%)
INFORMASI KONDISI KEUANGAN						
1	Posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
2	Prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan	Penting	Tidak	Tidak	1	20
3	Perubahan aktiva bersih/ekuitas	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
4	Rincian hasil operasional pemerintah daerah selama 1 periode pelaporan	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
5	Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
6	Kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
7	Rincian dan analisis jumlah hutang pemerintah daerah	Penting	Tidak	Tidak	1	20
8	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah	Penting	Tidak	Tidak	1	20
INFORMASI KONDISI EKONOMI						
9	Nilai dan potensi sumber jasa yang dikelola pemerintah daerah	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
10	Prediksi pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	1	20
11	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto lima tahun terakhir	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
12	Perkembangan ekspor impor	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
13	Laju Inflasi	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60

No	Jenis Informasi	Hasil Empiris	PP No. 24/2005	Permendagri 13/2006	Skor	TCR (%)
14	Jumlah Pengangguran terbuka	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
15	Pertumbuhan nilai investasi 5 tahun terakhir	Penting	Tidak	Tidak	1	20
16	Pendapatan perkapita penduduk	Penting	Tidak diwajibkan	Tidak diwajibkan	3	60
17	Dampak aktivitas operasional pemerintah daerah terhadap Perekonomian	Penting	Tidak	Tidak	1	20
	INFORMASI KEPATUHAN TERHADAP ATURAN					
18	Kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
19	Kecukupan kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah daerah	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
20	Kepatuhan penyajian laporan keuangan pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
21	Perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
	INFORMASI KINERJA					
22	Perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah tahun ini dengan tahun sebelumnya	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
23	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah, seperti: Pelayanan perizinan dan tarifnya	Penting	Tidak	Tidak	1	20
24	Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah daerah.	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
25	Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemerintah daerah	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
26	Evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
	INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN					

No	Jenis Informasi	Hasil Empiris	PP No. 24/2005	Permendagri 13/2006	Skor	TCR (%)
27	Perencanaan pemerintah daerah 5 tahun ke depan	Penting	Tidak	Tercantum	3	60
28	Perencanaan alokasi sumber daya	Penting	Tidak	Tercantum	3	60
29	<i>Trend</i> ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang	Penting	Tidak	Tidak	1	20
30	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah	Penting	Tidak	Tercantum	3	60
31	Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan	Penting	Tidak	Tercantum	3	60
32	Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah daerah	Penting	Tidak	Tidak	1	20
INFORMASI NARATIF						
33	Deskripsi sebelum laporan keuangan	Penting	Tidak	Tidak	1	20
34	Laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah daerah	Penting	Tidak	Tercantum	3	60
35	Kebijakan akuntansi	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
36	<i>Overview</i> operasi pemerintah daerah	Penting	Tercantum	Tercantum	5	100
37	Kondisi Geografis	Penting	Tidak	Tidak	1	20
38	Kondisi Demografis	Penting	Tidak	Tidak	1	20
39	Kebijakan Pemerintah bidang investasi, perpajakan, ketenagakerjaan, perbankan serta kebijakan bidang ekspor dan impor	Penting	Tidak	Tidak	1	20
40	Ketersediaan infrastruktur	Penting	Tidak	Tidak	1	20
41	Potensi unggulan daerah	Penting	Tidak	Tidak	1	20
42	Stabilitas politik	Penting	Tidak	Tidak	1	20
43	Stabilitas keamanan	Penting	Tidak	Tidak	1	20
Persentase kesesuaian						57

Dari tabel 4.22 terlihat bahwa kesesuaian PP No. 24 tahun 2005 dan permendagri 13 tahun 2006 dengan kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hanya 57%. Hipotesis ke-2 menyatakan

bahwa, aturan pelaporan keuangan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Aturan tentang pelaporan keuangan dianggap sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah jika nilai TCR besar atau sama dengan 68%. Dari nilai TCR diatas dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya aturan pelaporan keuangan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Carlson (1986), Daniels & Daniels (1991), Yuliarni (2003) dan Martingsih (2008).

4.5 Pengujian Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Latar Belakang Pendidikan Responden Terhadap Kebutuhan Atas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sebagai analisis tambahan, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan responden terhadap kebutuhan mereka terhadap informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis akan menunjukkan apakah ada karakteristik tertentu dari responden yang menyebabkan perbedaan dalam kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan pengujian *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA).

Salah satu bagian dari uji multivariat adalah menguji secara serempak (*simultaneously*) efek dari setiap variabel independen terhadap kelompok dependen. Tiap-tiap faktor yaitu tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan dalam penelitian ini mempunyai efek utama. Pengolahan data dengan program SPSS juga memberikan empat alternatif uji signifikansi multivariat, yaitu Pillai's Trace, Wilk's Lambda, Hotelling's Trace, dan Roy's Largest Root. Menurut Hair, J. et al (1998) dalam Martingsih (2008) menyatakan bahwa diantara keempat prosedur dalam MANOVA tersebut, hasil estimasi Roy's Largest Root termasuk paling baik. Berikut adalah ringkasan hasil uji *Multivariate*:

Tabel 4.23
Hasil *Multivariate Tests*

Effect		F	Sig
Tingkat pendidikan	Roy's Largest Root	3,176	0,009
Latar Belakang Pendidikan	Roy's Largest Root	3,706	0,004

Sumber: Lampiran 7

Hasil uji *Multivariate* menunjukkan bahwa karakteristik responden tingkat pendidikan mempengaruhi kebutuhan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara serempak (*simultaneously*) yang dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05. Demikian juga dengan karakteristik responden latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kebutuhan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara serempak. Hal ini bisa dilihat dari nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05. Hipotesis 3.1 menyatakan bahwa kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan Hipotesis 3.2 menyatakan bahwa bahwa kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi latar belakang pendidikan, berdasarkan hasil analisis diatas hipotesis kedua hipotesis ketiga terdukung. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Martiningsih (2008) dan Fotanella (2010).

Pengaruh karakteristik responden terhadap variabel kebutuhan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah selain diuji serempak juga diuji secara individu. Berdasar hasil *test of between-subjects effect*, maka dapat dilihat pengaruh karakteristik responden terhadap kebutuhan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara individu sebagai berikut.

Tabel 4.24
Hasil *Test of Between-Subjects Effects*

Variabel Independen	Kategori	Sig & Mean	Keu	Eko	Patuh	Knrj	Budg	Nar
Tingkat Pendidikan		Sig	0,043	0,051	0,162	0,011	0,440	0,012
	SMU	<i>Mean</i>	3,55	3,36	3,36	3,18	3,73	3,73
	Diploma	<i>Mean</i>	4,00	4,00	3,89	4,11	4,22	3,78
	Sarjana	<i>Mean</i>	4,06	4,00	3,91	4,09	4,06	4,15
	Pasca Sarjana	<i>Mean</i>	4,02	4,30	4,20	4,20	4,30	4,30
Latar belakang pendidikan		Sig	0,001	0,001	0,000	0,002	0,002	0,009
	Non-Akuntansi	<i>Mean</i>	3,85	3,74	3,64	3,70	3,94	3,96
	Akuntansi	<i>Mean</i>	4,50	3,74	4,50	4,68	4,44	4,31

Sumber: Lampiran 7

Hasil *test of between-subjects effects* menunjukkan bahwa karakteristik tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebutuhan informasi keuangan, informasi kinerja, dan informasi naratif. Sedangkan karakteristik latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap informasi kondisi keuangan, ekonomi, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif. Hal tersebut bisa dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai *mean* yang hampir sama atau tidak berbeda secara absolut antar kategori. Setelah diketahui bahwa karakteristik responden mempengaruhi kebutuhan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat dikatakan bahwa kebutuhan informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah akan berbeda untuk karakteristik responden.

Berikut ini adalah karakteristik responden yang mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah:

Tabel 4.25
Karakteristik Responden yang Signifikan Mempengaruhi
Kebutuhan Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Variabel	Karakteristik	Kesimpulan
1	Keuangan	Tingkat Pendidikan	Sig
		Latar Belakang Pendidikan	Sig
2	Ekonomi	Latar Belakang Pendidikan	Sig
3	Kepatuhan	Latar Belakang Pendidikan	Sig
4	Kinerja	Tingkat Pendidikan	Sig
		Latar Belakang Pendidikan	Sig
5	Perencanaan & penganggaran	Latar Belakang Pendidikan	Sig
6.	Naratif	Tingkat Pendidikan	Sig
		Latar Belakang Pendidikan	Sig

Sumber: lampiran 7

Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mempengaruhi kebutuhan responden atas informasi kondisi keuangan. Latar belakang pendidikan mempengaruhi kebutuhan responden terhadap informasi kondisi ekonomi. Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mempengaruhi kebutuhan responden terhadap informasi kepatuhan terhadap aturan. Latar belakang pendidikan mempengaruhi kebutuhan responden terhadap informasi kinerja. Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan mempengaruhi kebutuhan responden terhadap informasi perencanaan dan penganggaran. Latar belakang pendidikan mempengaruhi kebutuhan responden terhadap informasi naratif.

4.6 Analisis dan Interpretasi Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

- 1. Informasi tentang kondisi keuangan yang mencakup:**
 - a. posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemerintah pada akhir periode pelaporan
 - b. prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan.
 - c. perubahan aktiva bersih/ekuitas.
 - d. rincian hasil operasional (pendapatan dan pengeluaran) pemerintah selama 1 periode pelaporan.

- e. sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)
- f. kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
- g. rincian dan analisis jumlah hutang pemerintah
- h. prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah

2. Informasi Ekonomi

- a. nilai dan potensi sumber jasa yang dikelola pemerintah
- b. prediksi pertumbuhan ekonomi pemerintah
- c. pertumbuhan produk domestik bruto lima tahun terakhir
- d. perkembangan ekspor impor
- e. laju inflasi
- f. jumlah pengangguran terbuka
- g. pertumbuhan nilai investasi 5 tahun terakhir
- h. pendapatan perkapita penduduk
- i. dampak aktivitas operasional pemerintah terhadap perekonomian

3. Informasi tentang kepatuhan terhadap aturan, yaitu:

- a. kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan
- b. kecukupan kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah
- c. kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan
- d. perbandingan pengeluaran aktual dengan anggaran.

4. Informasi tentang Kinerja, mencakup:

- a. Perbandingan kinerja keuangan pemerintah tahun ini dengan tahun sebelumnya
- b. Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah.
- c. Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah.
- d. Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemerintah.
- e. Evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang.

5. Informasi Perencanaan dan Penganggaran, yang mencakup:

1. Perencanaan pemerintah 5 tahun ke depan
2. Perencanaan alokasi sumber daya

3. *Trend* ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaranyang akan datang
4. Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah.
5. Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan
6. Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah.

6. Informasi naratif, yang mencakup:

- a. *Overview* operasi pemerintah
- b. Deskripsi sebelum laporan keuangan
- c. Laporan pertanggungjawaban kepala pemerintahan
- d. Kebijakan akuntansi
- e. Kondisi Geografis
- f. Kondisi Demografis
- g. Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor import
- h. Ketersediaan infrastruktur
- i. Potensi unggulan daerah
- j. Stabilitas politik
- k. Stabilitas keamanan

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah batas minimal informasi yang harus tercakup dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a. Kondisi keuangan
- b. Kondisi ekonomi
- c. Kepatuhan terhadap aturan
- d. Kinerja
- e. Perencanaan dan Penganggaran
- f. Naratif

Jika dilihat dari elemen-elemen laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, aktiva, hutang dan ekuitas, maka jenis laporan keuangan dan informasi yang dikandung di dalamnya dapat diikhtisarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.26
Jenis Pelaporan Keuangan dan Informasi yang di Kandung

Jenis informasi	Jenis Laporan Keuangan
Posisi Keuangan	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Kinerja Keuangan Pemerintahan	Laporan Kinerja (Laporan Surplus/Defisit)
Arus Kas	Laporan Arus Kas
Perubahan ekuitas pemerintah	Laporan Perubahan Ekuitas
Rincian dan analisis jumlah hutang	Laporan Hutang
Prediksi kebutuhan tambahan sumber Keuangan	Catatan Atas Laporan Keuangan/ Informasi Pelengkap
Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah seperti biaya perizinan	Catatan Atas Laporan Keuangan/ Informasi Pelengkap
Perencanaan pemerintah 5 tahun ke depan	Catatan Atas Laporan Keuangan/ Informasi Pelengkap
Perencanaan alokasi sumber daya	Catatan Atas Laporan Keuangan/ Informasi Pelengkap
Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah	Catatan Atas Laporan Keuangan/ Informasi Pelengkap
Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan	Catatan Atas Laporan Keuangan/ Informasi Pelengkap
Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah	Catatan Atas Laporan Keuangan/ Informasi Pelengkap
Deskripsi sebelum laporan keuangan	Informasi Pelengkap
Pernyataan tanggung jawab kepala pemerintahan atas laporan keuangan pemerintah	Laporan Pertanggungjawaban
Informasi Naratif lainnya seperti: Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor import, Ketersediaan infrastruktur, Potensi unggulan daerah, informasi tentang Stabilitas politik dan keamanan	Catatan Atas Laporan Keuangan/ Informasi Pelengkap

Dari tabel diatas dapat diikhtisarkan batas minimal jenis pelaporan keuangan pokok pemerintah adalah berikut ini:

a. Laporan Kinerja Keuangan;

Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut (IPSAS 1):

- a) Pendapatan dari kegiatan operasional;
- b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;
- c) Surplus atau defisit.

Fokus pengukuran dalam laporan surplus devisit adalah mengikuti aliran sumber daya ekonomik yang diakui dan dicatat dengan basis akrual sehingga pengukuran tidak dibatasi hanya pada pengukuran asset likuid seperti pada laporan realisasi anggaran. Pengukuran dengan basis akrual yang berfokus pada pengukuran ekonimik, akan membarikan informasi kepada pengguna laporan tentang sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas, biaya dalam menjalankan operasi pelayanan publik dan informasi lain yang terdapat pada posisi keuangan dan perubahannya, serta informasi yang dapat digunakan untuk menilai apakah entitas tersebut beroperasi secara ekonomis (Bastian, 2006).

b. Laporan Perubahan Aktiva Bersih/Ekuitas;

IPSAS 1 paragraf 118 menyatakan, suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- a) Surplus atau defisit selama periode;
- b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;
- c) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan (IPSAS 1 paragraf 119):

- a) Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta perubahannya selama periode berjalan.
- b) Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas dana pada awal dan akhir periode mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah.

c. Neraca;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut (IPSAS 1):

- a) kas dan setara kas;
- b) investasi jangka pendek;
- c) piutang pajak dan bukan pajak;
- d) persediaan;
- e) investasi jangka panjang;
- f) aset tetap;
- g) kewajiban jangka pendek;
- h) kewajiban jangka panjang;
- i) ekuitas dana

d. Laporan Arus Kas;

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran (IPSAS 1 paragraf 126 yang menyatakan bahwa informasi arus kas menyediakan bagi pengguna laporan keuangan sebagai basis untuk menilai kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut)

e. Laporan Hutang;

Laporan Hutang mencakup rincian hutang periode berjalan dan profil jatuh tempo hutang (Rasuli, 2001 dalam Martiningsih, 2008).

f. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban berisi pernyataan pihak yang bertanggungjawab atas kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Rasuli, 2001 dalam Martiningsih, 2008).

g. Catatan atas Laporan Keuangan;

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut (SPAP, 2005):

- a) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
- d) kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- f) pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
- g) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- h) daftar dan skedul.

h. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Informasi penting yang belum diungkapkan pada bagian manapun dari pelaporan keuangan pemerintah dapat diungkapkan dalam informasi pelengkap (GASB Concept, Statement no 2). Berdasarkan seluruh hasil penelitian, berikut ini adalah informasi yang harus diungkapkan didalam informasi pelengkap pelaporan keuangan pemerintah, jika belum diungkapkan pada bagian manapun dalam pelaporan keuangan pemerintah:

1. Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan serta ekspor impor
2. Potensi unggulan daerah

3. Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah, seperti: Pelayanan perizinan dan tarifnya
4. Ketersediaan infrastruktur
5. Stabilitas keamanan
6. Stabilitas politik
7. Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah
8. *Trend* ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang
9. prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan
10. perencanaan alokasi sumber daya
11. prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah
12. prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan
13. prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah daerah
14. Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah

4.7 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah rekomendasi struktur Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 1 tentang penyajian pelaporan keuangan dan rekomendasi struktur dan isi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4.7.1 Rekomendasi Ikhtisar Struktur Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 Penyajian Pelaporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian berikut ini ikhtisar usulan Struktur Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah no. 1 tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Pemerintah.

Tabel 4.27.
Ikhtisar Struktur Usulan PSAP No. 1

Tujuan		
Ruang Lingkup		
Basis Akuntansi		
Definisi		
Tujuan Pelaporan Keuangan		
Jenis Informasi	Informasi Utama	Informasi Pelengkap
Kondisi Keuangan	Posisi Aset, Hutang dan Ekuitas pada akhir periode pelaporan	
		Prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan
	Perubahan aktiva bersih/ekuitas	
	Rincian hasil operasional (pendapatan dan pengeluaran) pemerintah selama 1 periode pelaporan	
	Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)	
	Kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang	
	Rincian dan analisis jumlah hutang pemerintah	
		Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah
	Nilai dan potensi sumber jasa yang dikelola pemerintah	
Kondisi Ekonomi		Prediksi pertumbuhan ekonomi pemerintah rediksi pertumbuhan ekonomi pemerintah
	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto lima tahun terakhir	
	Perkembangan ekspor impor	
	Laju Inflasi	
	Jumlah Pengangguran terbuka	
		Pertumbuhan nilai investasi 5 tahun terakhir

Jenis Informasi	Informasi Utama	Informasi Pelengkap
	Pendapatan perkapita penduduk	
	Dampak aktivitas operasional pemerintah terhadap Perekonomian	
Kepatuhan Terhadap Aturan	Kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan	
	Kecukupan kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran Pemerintah	
	Kepatuhan pelaporan Keuangan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	
	Perbandingan pengeluaran aktual dengan anggaran.	
Kinerja	Perbandingan kinerja keuangan pemerintah tahun ini dengan tahun sebelumnya	
		Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah seperti masalah perizinan
	Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah.	
	Evaluasi efektivitas program dan aktivitas Pemerintah	
	Evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang.	
Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan pemerintah 5 tahun ke depan	
		Perencanaan alokasi sumber daya
		<i>Trend</i> ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang
		Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah
		Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan
		Prediksi kegagalan menyediakan sumberdaya untuk operasional pemerintah

Jenis Informasi	Informasi Utama	Informasi Pelengkap
Naratif	Deskripsi sebelum laporan keuangan	
	Laporan pertanggungjawaban kepala pemda	
	Kebijakan akuntansi	
	Overview operasi pemda	
	Kondisi Geografis	
	Kondisi Demografis	
		Kebijakan Pemerintah dibidang investasi, perpajakan, perbankan, ketenagakerjaan dan ekspor import
		Ketersediaan infrastruktur
		Potensi unggulan daerah
		Stabilitas politik dan
		Stabilitas keamanan
Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan		
Komponen-komponen Pelaporan Keuangan		
Pertimbangan-pertimbangan yang Mendasari Pelaporan Keuangan		
Struktur dan Isi		
Tanggal Efektif		

4.7.2 Rekomendasi Struktur dan Isi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah rekomendasi Struktur dan Isi masing-masing komponen pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dibutuhkan investor dan kreditor:

1. Struktur dan Isi Laporan Surplus Dan Defisit

UNTUK KEDAJARAN BANGSA
PEMERINTAH XXX
LAPORAN SURPLUS DAN DEFISIT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR S/D TANGGAL 31 DESEMBER 20XX

NO	URAIAN	20XX	20XX-1
A.	PENDAPATAN		
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	Pendapatan Pajak Daerah	Rp xxx	Rp xxx
	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp xxx	Rp xxx

NO	URAIAN	20XX	20XX-1
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tak Dipisahkan	Rp xxx	Rp xxx
	Lain-lain PAD yang Sah	Rp xxx	Rp xxx
	Jumlah PAD	Rp xxx	Rp xxx
2	Pendapatan Transfer		
	Transfer Pemerintah Pusat		
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp xxx	Rp xxx
	Dana Alokasi Umum	Rp xxx	Rp xxx
	Dana Alokasi Khusus	Rp xxx	Rp xxx
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	Rp xxx	Rp xxx
	Transfer Pemerintah Propinsi		
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp xxx	Rp xxx
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp xxx	Rp xxx
3	Pendapatan Lain-lain yang Sah		
	Pendapatan Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	Rp xxx	Rp xxx
	TOTAL PENDAPATAN		
B	BELANJA		
1	Belanja Operasi	Rp xxx	Rp xxx
	Belanja Pegawai	Rp xxx	Rp xxx
	Belanja Barang dan Jasa	Rp xxx	Rp xxx
	Belanja Bunga	Rp xxx	Rp xxx
	Belanja Subsidi	Rp xxx	Rp xxx
	Belanja Hibah	Rp xxx	Rp xxx
	Belanja Sosial	Rp xxx	Rp xxx
	Jumlah Belanja Operasi	Rp xxx	Rp xxx
2	Belanja Modal		
	Belanja Modal	Rp xxx	Rp xxx
	Jumlah Belanja Modal	Rp xxx	Rp xxx
3	Belanja Tak Terduga		
	Belanja Tak Terduga	Rp xxx	Rp xxx
	Jumlah Belanja Tak Terduga	Rp xxx	Rp xxx
	TOTAL BELANJA	Rp xxx	Rp xxx
	SURPLUS/DEFISIT	Rp xxx	Rp xxx



2. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH XXX
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX

URAIAN	JUMLAH
Saldo Ekuitas 31 Desember 20XX-1	Rp xxx
Perubahan kebijakan akuntansi	Rp xxx
Saldo Dinyatakan Kembali	Rp xxx
Perubahan Ekuitas Selama 20XX	
Laba Revaluasi Aktiva Tetap	Rp xxx
Laba/Rugi revaluasi investasi	Rp xxx
Pendapatan bersih diakui secara langsung	Rp xxx
Surplus / defisit Selama periode	Rp xxx
Saldo Ekuitas 31 Desember 20XX	Rp xxx

3. Struktur dan Isi Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

NERACA
 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
 PER 31 DESEMBER 20XX DAN 20XX-1

No.	URAIAN	20XX	20XX-1
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bank Kas Daerah	Rp xxx	Rp xxx
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp xxx	Rp xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp xxx	Rp xxx
6	Investasi Jangka Pendek	Rp xxx	Rp xxx
7	Piutang Pajak	Rp xxx	Rp xxx
8	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp xxx	Rp xxx
9	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	Rp xxx	Rp xxx
10	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	Rp xxx	Rp xxx
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	Rp xxx	Rp xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
13	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Rp xxx	Rp xxx
14	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	Rp xxx	Rp xxx
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp xxx	Rp xxx
16	Piutang Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
17	Persediaan	Rp xxx	Rp xxx
18	Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17)	Rp xxx	Rp xxx
19	INVESTASI JANGKA PANJANG		

No.	URAIAN	20XX	20XX-1
20	Investasi Nonpermanen		
21	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	Rp xxx	Rp xxx
22	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	Rp xxx	Rp xxx
23	Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
24	Investasi dalam Surat Utang Negara	Rp xxx	Rp xxx
25	Investasi dalam Proyek Pembangunan	Rp xxx	Rp xxx
26	Investasi Nonpermanen lainnya	Rp xxx	Rp xxx
27	Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 27)	Rp xxx	Rp xxx
28	Investasi Permanen	Rp xxx	Rp xxx
29	Penyertaan Modal Pemerintah	Rp xxx	Rp xxx
30	Investasi Permanen Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
31	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	Rp xxx	Rp xxx
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	Rp xxx	Rp xxx
33	ASET TETAP		
34	Tanah	Rp xxx	Rp xxx
35	Peralatan dan Mesin	Rp xxx	Rp xxx
36	Gedung dan Bangunan	Rp xxx	Rp xxx
37	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp xxx	Rp xxx
38	Aset Tetap Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
39	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp xxx	Rp xxx
40	Akumulasi Penyusutan	Rp xxx	Rp xxx
41	Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40)	Rp xxx	Rp xxx
42	DANA CADANGAN		
43	Dana Cadangan	Rp xxx	Rp xxx
44	Jumlah Dana Cadangan (43)	Rp xxx	Rp xxx
45	ASET LAINNYA		
46	Tagihan Penjualan Angsuran	Rp xxx	Rp xxx
47	Tuntutan Perbendaharaan	Rp xxx	Rp xxx
48	Tuntutan Ganti Rugi	Rp xxx	Rp xxx
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp xxx	Rp xxx
50	Aset Tak Berwujud	Rp xxx	Rp xxx
51	Aset Lain-Lain	Rp xxx	Rp xxx
52	Jumlah Aset Lainnya (46 s/d 49)	Rp xxx	Rp xxx
53	JUMLAH ASET (18+32+41+52)	Rp xxx	Rp xxx
54	KEWAJIBAN		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp xxx	Rp xxx
57	Utang Bunga	Rp xxx	Rp xxx
58	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	Rp xxx	Rp xxx
59	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
60	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	Rp xxx	Rp xxx
61	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp xxx	Rp xxx

No.	URAIAN	20XX	20XX-1
62	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Obligasi	Rp xxx	Rp xxx
63	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
64	Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
65	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57s/d 65)	Rp xxx	Rp xxx
66	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
67	Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	Rp xxx	Rp xxx
68	Utang Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	Rp xxx	Rp xxx
69	Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp xxx	Rp xxx
70	Utang Dalam Negeri-Obligasi	Rp xxx	Rp xxx
71	Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
72	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73)	Rp xxx	Rp xxx
73	JUMLAH KEWAJIBAN (66+74)	Rp xxx	Rp xxx
74	EKUITAS DANA		
75	EKUITAS DANA LANCAR		
76	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp xxx	Rp xxx
77	Pendapatan yang Ditangguhkan	Rp xxx	Rp xxx
78	Cadangan Piutang	Rp xxx	Rp xxx
79	Cadangan Persediaan	Rp xxx	Rp xxx
80	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	Rp xxx	Rp xxx
81	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82)	Rp xxx	Rp xxx
82	EKUITAS DANA INVESTASI		
83	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp xxx	Rp xxx
84	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	Rp xxx	Rp xxx
85	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	Rp xxx	Rp xxx
86	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	Rp xxx	Rp xxx
87	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88)	Rp xxx	Rp xxx
88	EKUITAS DANA CADANGAN		
89	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	Rp xxx	Rp xxx
90	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	Rp xxx	Rp xxx
91	JUMLAH EKUITAS DANA (83+89+92)	Rp xxx	Rp xxx
92	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75+93)	Rp xxx	Rp xxx

4. Struktur dan Isi Laporan Hutang

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA XXX
LAPORAN HUTANG
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20XX

URAIAN	JUMLAH
HUTANG PEMERINTAH	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp xxx
Utang Bunga	Rp xxx
Utang Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	Rp xxx
Obligasi Pemerintah Daerah	Rp xxx
Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	Rp xxx
Utang Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	Rp xxx
Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp xxx
TOTAL PEREDARAN HUTANG	Rp xxx
Dikurangi:	
Surat Berharga	Rp xxx
Deposito	Rp xxx
JUMLAH HUTANG BERSIH	Rp xxx

5. Struktur dan Isi Profil Jatuh Tempo Hutang

URAIAN	20XX	20XX+1	20XX+2	NILAI BUKU
PEREDARAN HUTANG PEMERINTAH DAERAH				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Utang Bunga	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Utang Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Obligasi Pemerintah Daerah	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat				
Utang Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx
TOTAL PEREDARAN HUTANG	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx	Rp xxx

6. Struktur dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Kepala Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*)..... yang terdiri dari (a) Laporan Surplus/Defisit; (b) Laporan Perubahan Ekuitas; (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas; (e) Laporan Hutang; dan (f) Catatan Atas Laporan Keuangan dan f) informasi pelengkap, Tahun Anggaran 20XX sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami. Pelaporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan dan informasi pelengkap secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

....., tanggal

Gubernur/Bupati/Walikota*)

(tanda tangan)

(nama lengkap)



BAB V

KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi jenis informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh investor dan kreditor. Di dalam penelitian ini juga dilihat kesesuaian kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan aturan pelaporan keuangan pemerintah yaitu PP No. 24 tahun 2005 dan Permendagri 13 tahun 2006. Kesimpulan yang merupakan inti dari analisis dan pengujian data dapat dijelaskan berikut ini:

1. Investor dan kreditor membutuhkan informasi kondisi keuangan, informasi kondisi ekonomi, informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif di dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Aturan pelaporan keuangan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan investor dan kreditor.
3. Tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan investor dan kreditor secara serempak berpengaruh terhadap kebutuhan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintahan daerah.

5.2 Saran

Saran yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang belum diatur dalam PP No. 24 tahun 2005 dan atau Permendagri No. 13 tahun 2006, serta rekomendasi jenis laporan keuangan yang dibutuhkan yaitu:

No	Jenis Informasi	Rekomendasi Pelaporan Keuangan
1.	Prediksi kebutuhan tambahan sumber Keuangan	Informasi pelengkap
2.	Rincian dan analisis jumlah hutang Pemerintah	Laporan Hutang
3.	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemerintah seperti perizinan	Informasi pelengkap
4.	Perencanaan pemerintah 5 tahun ke depan	Informasi pelengkap
5.	Perencanaan alokasi sumber daya	Informasi pelengkap
6.	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemerintah.	Informasi pelengkap
7.	Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan	Informasi pelengkap
8.	Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemerintah	Informasi pelengkap
9.	Deskripsi sebelum laporan keuangan	Informasi pelengkap
10.	Laporan pertanggungjawaban kepala Pemerintahan	Laporan Pertanggungjawaban
11.	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemerintah	Informasi pelengkap
12.	deskripsi sebelum laporan keuangan	Informasi pelengkap
13.	Ketersediaan infrastruktur	Informasi pelengkap
14.	Potensi unggulan daerah	Informasi pelengkap
15.	Stabilitas politik	Informasi pelengkap
17.	Stabilitas keamanan	Informasi pelengkap

2. Laporan keuangan pokok pemerintah daerah yang ada saat ini seharusnya ditambah Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus/Defisit), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Hutang serta Laporan Pertanggungjawaban kepala pemerintah daerah.
3. Selain laporan keuangan pokok, pemerintah daerah disarankan menambah informasi pendukung/pelengkap lain sesuai rekomendasi di atas agar fungsi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai sarana prediktif dan prospektif dapat terpenuhi selain sebagai sarana akuntabilitas publik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner. Dimana metode kuesioner ini memiliki keterbatasan berupa lemahnya kontrol terhadap keakuratan jawaban responden karena ada kemungkinan responden tidak menjawab dengan keadaan yang sesungguhnya.

5.4 Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini adalah:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian dengan mengambil sampel diseluruh provinsi yang ada di Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya dapat melengkapi sampel pengguna laporan keuangan pemerintah lain yaitu pihak yang berperan dalam pemberian donasi/pinjaman seperti World Bank.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2004. *Accounting Theory*, 5th edition. United States: Thomson Learning
- BPPS, 2005, Laporan Perekonomian Sumatera Barat tahun 2000-2005.
- BPPS, 2007, Direktori Perusahaan Tahun 2006
- Daniels, Janet D. and Daniels, Craig E. 1991. Municipal Financial Reports: What Users Want. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 10 Issue1 pp 15-38.
- Firmansyah, Dadang, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia Periode Tahun 1985 – 2004, Skripsi, UII, Yogyakarta
- Fontanella, Amy, 2010, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengguna Dalam Memanfaatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tesis, Universitas Andalas, Padang
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *Standar Akuntansi Pemerintahan, Telaah Kritis PP No. 24 Tahun 2005*, Yogyakarta: BPFE
- Governmental Accounting Standard Board. 1998. *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Com.
- Gozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivarite dengan Variabel SPSS, cetakan keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hapsari, Andhisa Setya. 2008. Tinjauan Kebermanfaatan Laporan Keuangan Audit BPK (Refleksi Eksistensi dan Peranan BPK)
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. Teori Akuntansi. Edisi Revisi Cetakan keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa
- International Federation of Accountants. 1991. Public Sector Committee Study Nomor 1. *Financial Reporting by National Governments*.
- International Federation of Accountants. 2000. Public Sector Committee Study Nomor 11. *Government Financial Reporting*.
- International Public Sector Accounting Standards Board. International Public Sector Accounting Standard 1 *Presentation of Financial Statements*. Issued

January 2007

- Jones, Rowan, and Maurice Pendlebury, (2000), *Public Sector Accounting*, Fifth Edition, Pearson Education Ltd., England.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kurdi. Moch. Yasin. 2010. *Pengembangan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Bidang Infrastruktur* Artikel. Diunduh dari www.google.com tanggal 1 April 2010
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Martiningsih, RR. Sri, Pancawati. 2008. *Analisis Kebutuhan Informasi Pemerintahan : Studi Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada
- Misra, Fauzan. 2008. *Investigasi dan Analisis Empiris Praktek Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta da Jawa Tengah)*. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada
- Mack, Janet and Christine Ryan. 2006. *Reflections on the Theoretical Underpinnings of the General-Purpose Financial reports of Australian government Departments*, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 19 No. 4 pp. 592-612.
- Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No. 1, Mei 2006
- Nugroho, Ugie (2010), *Bank BUMN dan Proyek Pemerintah*. Artikel. Diunduh dari www.google.com
- Pambudhi, P. Agung, 2005, *Rating of Investment Attractiveness among 214 Regencies & Cities, 2004 A Survey of Business Perception*, Makalah dipresentasikan pada simposium *Strengthening Public Services In Decentralizing Indonesia: Approaches for Measuring Performance of Local Governments*, World Bank, Bali 28-29 Agustus.
- Paulsson, Gert. 2006. *Accrual Accounting In The Public Sector: Experiences From The Central Government In Sweden*. *Financial Accountability & Management*
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Prawatyo Aditya, *Factor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, 1996

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

_____. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

_____. *Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

_____. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

_____. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Riduwan, 2008. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Peneliti*, Alfabeta, Bandung.

Ryan, Christine; Trevor Stanley dan Morton Nelson. 2002. *Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999. Financial Accountability & Management*, Vol. 18 (3).

Sarana, Jiwa. *Analitis Kinerja Investasi didaerah*, artikel, penelusuran www.google.com tanggal 21 April 2010

- Sekaran, Uma. 2006 *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York
- Steccolini, Ileana. 2002. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?*. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin, September 2002.
- Sudjana, 2001, *Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik terhadap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah*
- Suzeta, Paskah, *Proyek Pemerintah, Swasta Ditargetkan Dapat US\$37 Miliar*, Media Indonesia - Kamis, 20 Agustus, 2009
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Suwardjono. 2006. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE
- Sujiyanto, E. A. 2007. *Aplikasi Statistik Dengan SPSS Untuk Pemula*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Tim Peneliti Universitas Andalas, 2009, *Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2009 Provinsi Sumatera Barat*, Seminar Nasional, Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009.
- Yuliari, Gusti Putu Ayu. 2006. *Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Indonesia: Suatu Studi Eksploratif mengenai Kebutuhan dan Permintaan Stakeholder akan Informasi Keuangan Pemerintah*. Tesis UGM. Yogyakarta.

LAMPIRAN 1

Hal: Permohonan kesediaan menjadi responden

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr Responden
di Tempat

Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswa Program Magister Sains Program Studi Akuntansi Universitas Andalas yang sedang melakukan penelitian ilmiah (penulisan tesis) mengenai:

KEBUTUHAN INVESTOR DAN KREDITOR ATAS INFORMASI DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaporan Keuangan Pemerintah adalah wujud tanggung jawab pemerintah terhadap para penggunanya, selain itu pelaporan keuangan pemerintah juga berfungsi prospektif dan prediktif yang membantu pengguna untuk pengambilan keputusan. Penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui jenis informasi apakah yang dibutuhkan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui apakah aturan tentang pelaporan keuangan pemerintah telah sesuai kebutuhan investor dan kreditor.
3. Untuk melihat pengaruh tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikan investor dan kreditor terhadap kebutuhan investor dan kreditor atas informasi dalam pelaporan keuangan pemerintahan.

Penelitian ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan studi dan tidak untuk tujuan lain. Untuk itu, saya mohon Bapak/Ibu/Sdr berkenan membantu penelitian ini dengan menjawab semua pertanyaan pada kolom jawaban yang telah disediakan sesegera mungkin.

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya,

Armel Yentifa
BP 08 212 20 007

C. PERNYATAAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN RESPONDEN TERHADAP INFORMASI YANG SEHARUSNYA DISAJIKAN DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Jika Bpk/Ibu/Sdr diberikan pelaporan keuangan pemerintah daerah, informasi apakah yang menurut Bpk/Ibu/Sdr penting untuk disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah? Untuk itu berilah tanda tick (√) pada lima pilihan jawaban yang tersedia yaitu:

- TP = Tidak Penting,
 KP = Kurang Penting,
 CP = Cukup Penting
 P = Penting, dan
 SP = Sangat Penting

No.	Item Pertanyaan	TP	KP	CP	P	SP
	INFORMASI KONDISI KEUANGAN					
1	Posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemda pada akhir periode pelaporan					
2	Prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan					
3	Perubahan aktiva bersih/ekuitas					
4	Rincian hasil operasional pemda selama 1 periode pelaporan					
5	Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)					
6	Kemampuan pemda untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang					
7	Rincian dan analisis jumlah hutang pemda					
8	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda					
	INFORMASI KONDISI EKONOMI					
9	Nilai dan potensi sumber jasa yang dikelola pemda					
10	Prediksi pertumbuhan ekonomi pemda					
11	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto lima tahun terakhir					
12	Perkembangan ekspor impor					
13	Laju Inflasi					
14	Jumlah Pengangguran terbuka					
15	Pertumbuhan nilai investasi 5 tahun terakhir					
16	Pendapatan perkapita penduduk					
17	Dampak aktivitas operasional pemda terhadap Perekonomian					
	INFORMASI KEPATUHAN TERHADAP ATURAN					
18	Kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan					
19	Kecukupan kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemda					
20	Kepatuhan penyajian laporan keuangan pemda dengan Standar Akuntansi Pemerintah					
21	Perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran					

	INFORMASI KINERJA					
22	Perbandingan kinerja keuangan pemda tahun ini dengan tahun sebelumnya					
23	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemda, seperti: Pelayanan perizinan dan tarifnya					
24	Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah daerah.					
25	Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemda					
26	Evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang					
	INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN					
27	Perencanaan pemda 5 tahun ke depan					
28	Perencanaan alokasi sumber daya					
29	<i>Trend</i> ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang					
30	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemda					
31	Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan					
32	Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemda					
	INFORMASI NARATIF					
33	Deskripsi sebelum laporan keuangan					
34	Laporan pertanggungjawaban kepala pemda					
35	Kebijakan akuntansi					
36	<i>Overview</i> operasi pemda					
37	Kondisi Geografis					
38	Kondisi Demografis					
39	Kebijakan Pemerintah					
	1) Kebijakan investasi					
	2) Kebijakan perpajakan					
	3) Aturan ketenagakerjaan					
	4) Kebijakan perbankan					
	5) Kebijakan ekspor dan impor					
40	Ketersediaan infrastruktur					
41	Potensi unggulan daerah					
42	Stabilitas politik					
43	Stabilitas keamanan					

Sumber: Martiningsih, 2008 dimodifikasi sesuai dengan tujuan penelitian

..... 2010

Responden

.....

Terima Kasih Atas Partisipasi Bpk/Ibu/Sdr

C. PERNYATAAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN RESPONDEN TERHADAP INFORMASI YANG SEHARUSNYA DISAJIKAN DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

Jika Bpk/Ibu/Sdr diberikan pelaporan keuangan pemerintah, informasi apakah yang menurut Bpk/Ibu/Sdr penting untuk disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah? Untuk itu berilah tanda tick (√) pada lima pilihan jawaban yang tersedia yaitu:

- TP = Tidak Penting,**
KP = Kurang Penting,
CP = Cukup Penting
P = Penting, dan
SP = Sangat Penting

No.	Item Pertanyaan	TP	KP	CP	P	SP
	INFORMASI KONDISI KEUANGAN					
1	Posisi aktiva, hutang dan aktiva bersih/ekuitas pemda pada akhir periode pelaporan					
2	Prediksi kebutuhan tambahan sumber keuangan					
3	Perubahan aktiva bersih/ekuitas					
4	Rincian hasil operasional pemda selama 1 periode pelaporan					
5	Sumber dan penggunaan sumber daya (aliran kas masuk dan kas keluar)					
6	Kemampuan pemda untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang					
7	Rincian dan analisis jumlah hutang pemda					
8	Prediksi pertumbuhan pendapatan pemda					
	INFORMASI KONDISI EKONOMI					
9	Nilai dan potensi sumber jasa yang dikelola pemda					
10	Prediksi pertumbuhan ekonomi pemda					
11	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto lima tahun terakhir					
12	Perkembangan ekspor impor					
13	Laju Inflasi					
14	Jumlah Pengangguran terbuka					
15	Pertumbuhan nilai investasi 5 tahun terakhir					
16	Pendapatan perkapita penduduk					
17	Dampak aktivitas operasional pemda terhadap Perekonomian					
	INFORMASI KEPATUHAN TERHADAP ATURAN					
18	Kesesuaian penggunaan sumber daya dengan aturan					
19	Kecukupan kontribusi sumber daya untuk membiayai seluruh pengeluaran pemda					
20	Kepatuhan penyajian laporan keuangan pemda dengan Standar Akuntansi Pemerintah					
21	Perbandingan penerimaan dan pengeluaran aktual dengan anggaran					

	INFORMASI KINERJA					
22	Perbandingan kinerja keuangan pemda tahun ini dengan tahun sebelumnya					
23	Evaluasi pelayanan (termasuk biaya jasa) yang diberikan pemda, seperti: Pelayanan perizinan dan tarifnya					
24	Evaluasi efisiensi program dan aktivitas pemerintah daerah.					
25	Evaluasi efektivitas program dan aktivitas pemda					
26	Evaluasi program jangka pendek dan jangka panjang					
	INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN					
27	Perencanaan pemda 5 tahun ke depan					
28	Perencanaan alokasi sumber daya					
29	<i>Trend</i> ketersediaan pendapatan yang akan datang untuk mendanai pengeluaran yang akan datang					
30	Prediksi jumlah kontribusi sumber daya untuk mendukung aktivitas pemda					
31	Prediksi keefektifan program dan aktivitas yang diusulkan					
32	Prediksi kegagalan menyediakan sumber daya untuk operasional pemda					
	INFORMASI NARATIF					
33	Deskripsi sebelum laporan keuangan					
34	Laporan pertanggungjawaban kepala pemda					
35	Kebijakan akuntansi					
36	<i>Overview</i> operasi pemda					
37	Kondisi Geografis					
38	Kondisi Demografis					
39	Kebijakan Pemerintah					
	1) Kebijakan investasi					
	2) Kebijakan perpajakan					
	3) Aturan ketenagakerjaan					
	4) Kebijakan perbankan					
	5) Kebijakan ekspor dan impor					
40	Ketersediaan infrastruktur					
41	Potensi unggulan daerah					
42	Stabilitas politik					
43	Stabilitas keamanan					

Sumber: Martiningsih, 2008 dimodifikasi sesuai dengan tujuan penelitian

..... 2010

Responden

.....

Terima Kasih Atas Partisipasi Bpk/Ibu/Sdr

LAMPIRAN 3
HASIL UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Keu	Eko	patuh	Kinj	Angrn	Nar
N		63	63	63	63	63	63
Normal Parameters ^a	Mean	31.7619	35.3651	15.0317	19.8467	22.8254	43.9406
	Std. Deviation	6.67377	7.10134	3.23772	3.93044	7.17644	7.66308
Most Extreme Differences	Absolute	.133	.131	.141	.150	.192	.144
	Positive	.109	.087	.097	.095	.159	.074
	Negative	-.133	-.131	-.141	-.150	-.192	-.144
Kolmogorov-Smirnov Z		1.058	1.043	1.122	1.194	1.526	1.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.213	.226	.161	.115	.019	.145
a. Test distribution is Normal.							



**HASIL UJI VALIDITAS
VARIABEL INFORMASI KONDISI KEUANGAN**

Correlations

		Keu1	Keu2	Keu3	Keu4	Keu5	Keu6	Keu7	Keu8	Keu
Keu1	Pearson Correlation	1	.763**	.687**	.764**	.634**	.643**	.691**	.673**	.871**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Keu2	Pearson Correlation	.763**	1	.799**	.587**	.626**	.554**	.557**	.554**	.807**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Keu3	Pearson Correlation	.687**	.799**	1	.727**	.673**	.525**	.519**	.524**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Keu4	Pearson Correlation	.764**	.587**	.727**	1	.786**	.700**	.680**	.642**	.880**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Keu5	Pearson Correlation	.634**	.626**	.673**	.786**	1	.670**	.556**	.533**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Keu6	Pearson Correlation	.643**	.554**	.525**	.700**	.670**	1	.846**	.707**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Keu7	Pearson Correlation	.691**	.557**	.519**	.680**	.556**	.846**	1	.803**	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Keu8	Pearson Correlation	.673**	.554**	.524**	.642**	.533**	.707**	.803**	1	.812**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Keu	Pearson Correlation	.871**	.807**	.809**	.880**	.820**	.849**	.848**	.812**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

VARIABEL INFORMASI KONDISI EKONOMI

Correlations

		Eko1	Eko2	Eko3	Eko4	Eko5	Eko6	Eko7	Eko8	Eko9	Eko
Eko1	Pearson Correlation	1	.783**	.683**	.537**	.640**	.418**	.759**	.687**	.681**	.834**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Eko2	Pearson Correlation	.783**	1	.829**	.450**	.686**	.381**	.754**	.741**	.790**	.863**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Eko3	Pearson Correlation	.683**	.829**	1	.571**	.709**	.495**	.714**	.735**	.810**	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Eko4	Pearson Correlation	.537**	.450**	.571**	1	.631**	.559**	.547**	.563**	.559**	.734**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Eko5	Pearson Correlation	.640**	.686**	.709**	.631**	1	.566**	.671**	.674**	.707**	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Eko6	Pearson Correlation	.418**	.381**	.495**	.559**	.566**	1	.453**	.535**	.467**	.667**
	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Eko7	Pearson Correlation	.759**	.754**	.714**	.547**	.671**	.453**	1	.693**	.717**	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Eko8	Pearson Correlation	.687**	.741**	.735**	.563**	.674**	.535**	.693**	1	.740**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Eko9	Pearson Correlation	.681**	.790**	.810**	.559**	.707**	.467**	.717**	.740**	1	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Eko	Pearson Correlation	.834**	.863**	.883**	.734**	.847**	.667**	.848**	.858**	.873**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

VARIABEL INFORMASI KEPATUHAN

Correlations

		patuh1	patuh2	patuh3	patuh4	patuh
patuh1	Pearson Correlation	1	.603**	.648**	.652**	.836**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63
patuh2	Pearson Correlation	.603**	1	.774**	.566**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63
patuh3	Pearson Correlation	.648**	.774**	1	.740**	.917**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	63	63	63	63	63
patuh4	Pearson Correlation	.652**	.566**	.740**	1	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	63	63	63	63	63
patuh	Pearson Correlation	.836**	.854**	.917**	.852**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



VARIABEL INFORMASI KINERJA

Correlations

	Kinj1	Kinj2	Kinj3	kirj4	Kinj5	Kinj
Kinj1 Pearson Correlation	1	.589**	.582**	.635**	.624**	.811**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
N	63	63	63	63	63	63
Kinj2 Pearson Correlation	.589**	1	.514**	.568**	.508**	.732**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
N	63	63	63	63	63	63
Kinj3 Pearson Correlation	.582**	.514**	1	.927**	.809**	.898**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
N	63	63	63	63	63	63
kirj4 Pearson Correlation	.635**	.568**	.927**	1	.857**	.935**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
N	63	63	63	63	63	63
Kinj5 Pearson Correlation	.624**	.508**	.809**	.857**	1	.891**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
N	63	63	63	63	63	63
Kinj Pearson Correlation	.811**	.732**	.898**	.935**	.891**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	63	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

VARIABEL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Correlations

		Angg1	Angg2	Angg3	Angg4	Angg5	Angg6	Angrn
Angg1	Pearson Correlation	1	.826**	.687**	.751**	.717**	.608**	.639**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
Angg2	Pearson Correlation	.826**	1	.674**	.813**	.701**	.609**	.640**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
Angg3	Pearson Correlation	.687**	.674**	1	.805**	.613**	.657**	.600**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
Angg4	Pearson Correlation	.751**	.813**	.805**	1	.785**	.752**	.648**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
Angg5	Pearson Correlation	.717**	.701**	.613**	.785**	1	.742**	.524**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
Angg6	Pearson Correlation	.608**	.609**	.657**	.752**	.742**	1	.506**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	63	63	63	63	63	63	63
Angg	Pearson Correlation	.639**	.640**	.600**	.648**	.524**	.506**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



VARIABEL INFORMASI NARATIF

Correlations

	Nar1	Nar2	Nar3	Nar4	Nar5	Nar6	Nar7	Nar8	Nar9	Nar10	Nar11	Nar
Nar1 Pearson Correlation	1	.465**	.616**	.468**	.483**	.420**	.327**	.478**	.401**	.378**	.388**	.641**
Nar1 Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001	.009	.000	.001	.002	.002	.000
Nar1 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar2 Pearson Correlation	.465**	1	.712**	.515**	.579**	.543**	.395**	.404**	.404**	.424**	.483**	.711**
Nar2 Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.001	.001	.001	.001	.000	.000
Nar2 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar3 Pearson Correlation	.616**	.712**	1	.609**	.664**	.633**	.389**	.552**	.532**	.540**	.533**	.805**
Nar3 Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000	.000	.000
Nar3 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar4 Pearson Correlation	.468**	.515**	.609**	1	.547**	.616**	.612**	.629**	.684**	.704**	.673**	.828**
Nar4 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
Nar4 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar5 Pearson Correlation	.483**	.579**	.664**	.547**	1	.771**	.329**	.332**	.367**	.338**	.368**	.690**
Nar5 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.008	.008	.003	.007	.003	.000
Nar5 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar6 Pearson Correlation	.420**	.543**	.633**	.616**	.771**	1	.455**	.459**	.488**	.437**	.410**	.736**
Nar6 Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.001	.000
Nar6 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar7 Pearson Correlation	.327**	.395**	.389**	.612**	.329**	.455**	1	.672**	.712**	.722**	.681**	.731**
Nar7 Sig. (2-tailed)	.009	.001	.002	.000	.008	.000		.000	.000	.000	.000	.000
Nar7 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar8 Pearson Correlation	.478**	.404**	.552**	.629**	.332**	.459**	.672**	1	.871**	.801**	.828**	.819**
Nar8 Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.008	.000	.000		.000	.000	.000	.000
Nar8 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar9 Pearson Correlation	.401**	.404**	.532**	.684**	.367**	.488**	.712**	.871**	1	.907**	.894**	.847**
Nar9 Sig. (2-tailed)	.001	.001	.000	.000	.003	.000	.000	.000		.000	.000	.000
Nar9 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar10 Pearson Correlation	.378**	.424**	.540**	.704**	.338**	.437**	.722**	.801**	.907**	1	.935**	.840**
Nar10 Sig. (2-tailed)	.002	.001	.000	.000	.007	.000	.000	.000	.000		.000	.000
Nar10 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar11 Pearson Correlation	.388**	.483**	.533**	.673**	.368**	.410**	.681**	.828**	.894**	.935**	1	.842**
Nar11 Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.003	.001	.000	.000	.000	.000		.000
Nar11 N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Nar Pearson Correlation	.641**	.711**	.805**	.828**	.690**	.736**	.731**	.819**	.847**	.840**	.842**	1
Nar Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
Nar N	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 5
HASIL UJI RELIABILITAS

VARIABEL INFORMASI KONDISI KEUANGAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	63	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.939	.939	8

VARIABEL INFORMASI KONDISI EKONOMI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	63	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.939	.940	9

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

VARIABEL INFORMASI KEPATUHAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	63	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	
		N of Items
.888	.888	4

VARIABEL INFORMASI KINERJA

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	63	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.907	.907	5

VARIABEL INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	63	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.936	.938	6

VARIABEL INFORMASI NARATIF

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	63	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	63	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.931	.932	11

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

LAMPIRAN 6
STATISTIK DESKRIPTIF

REKAPITULASI DISTRIBUSI JAWABAN INVESTOR DAN KREDITOR

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN										SKOR RATA-RATA	TCR
			STB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Informasi Kondisi Keuangan	1	1	1,6	5	7,9	13	20,6	27	42,9	17	27,0	3,86	77,14%
		2	1	1,6	4	6,3	13	20,6	27	42,9	18	28,6	3,90	78,10%
		3	1	1,6	5	7,9	14	22,2	27	42,9	16	25,4	3,83	76,51%
		4	1	1,6	7	11,1	13	20,6	26	41,3	16	25,4	3,78	75,56%
		5	1	1,6	5	7,9	9	14,3	21	33,3	27	42,9	4,08	81,59%
		6	1	1,6	6	9,5	8	12,7	17	27,0	31	49,2	4,13	82,54%
		7	1	1,6	6	9,5	9	14,3	22	34,9	25	39,7	4,03	80,63%
		8	1	1,6	4	6,3	6	9,5	25	39,7	27	42,9	4,16	83,17%
	Rerata		1	1,6	5,25	8,3	10,6	16,9	24	38,1	22,1	35,1	3,97	79,40%
2	Informasi Kondisi Ekonomi	9	1	1,6	5	7,9	11	17,5	28	44,4	18	28,6	3,90	78,10%
		10	1	1,6	5	7,9	7	11,1	28	44,4	22	34,9	4,03	80,63%
		11	0	0,0	7	11,1	9	14,3	28	44,4	19	30,2	3,94	78,73%
		12	1	1,6	6	9,5	16	25,4	25	39,7	15	23,8	3,75	74,92%
		13	0	0,0	5	7,9	13	20,6	27	42,9	18	28,6	3,92	78,41%
		14	1	1,6	7	11,1	17	27,0	18	28,6	20	31,7	3,78	75,56%
		15	0	0,0	5	7,9	10	15,9	27	42,9	21	33,3	4,02	80,32%
		16	0	0,0	7	11,1	6	9,5	31	49,2	19	30,2	3,98	79,68%
	Rerata		0,44	0,7	6	9,5	10,8	17,1	26,1	41,4	19,7	31,2	3,93	78,59%
3	Informasi Kepatuhan Terhadap Aturan	18	0	0,0	7	11,1	10	15,9	31	49,2	15	23,8	3,86	77,14%
		19	0	0,0	9	14,3	12	19,0	29	46,0	13	20,6	3,73	74,60%
		20	0	0,0	10	15,9	17	27,0	25	39,7	11	17,5	3,59	71,75%
		21	0	0,0	7	11,1	10	15,9	31	49,2	15	23,8	3,86	77,14%
	Rerata		0	0,0	8,25	13,1	12,3	19,5	29	46,0	13,5	21,7	3,76	75,16%
4	Informasi	22	0	0,0	7	11,1	8	12,7	22	34,9	26	41,3	4,06	81,27%
	Kinerja	23	0	0,0	3	4,8	6	9,5	26	41,3	28	44,4	4,24	84,87%
		24	0	0,0	7	11,1	11	17,5	31	49,2	14	22,2	3,83	76,51%
		25	0	0,0	7	11,1	14	22,2	25	39,7	17	27,0	3,83	76,51%
		26	0	0,0	7	11,1	9	14,3	31	49,2	16	25,4	3,89	77,78%
	Rerata		0	0,0	6,2	9,8	9,6	15,2	27	42,9	20,2	32,1	3,97	79,39%

NO	INDIKATOR	ITEM	SCOR JAWABAN										SCOR RATA-RATA	TCR			
			SB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)						
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%					
5	Informasi Percanaan Dan Penggaran		27	0	0,0	5	7,9	5	7,9	27	42,9	26	41,3	4,17	83,49%		
			28	0	0,0	6	9,5	2	3,2	31	49,2	24	38,1	4,16	83,17%		
			29	0	0,0	5	7,9	10	15,9	24	38,1	24	38,1	4,06	81,27%		
			30	1	1,6	4	6,3	11	17,5	27	42,9	20	31,7	3,97	79,37%		
			31	1	1,6	6	9,5	14	22,2	24	38,1	18	28,6	3,83	76,51%		
			32	1	1,6	8	12,7	13	20,6	20	31,7	22	34,9	3,81	76,19%		
						0,5	0,8	5,67	9,0	9,17	14,6	25,5	40,5	22,3	35,5	4,00	80,00%
				Informasi	33	0	0,0	6	9,5	16	25,4	29	46,0	12	19,0	3,75	74,92%
				Naratif	34	0	0,0	8	12,7	13	20,6	20	31,7	22	34,9	3,89	77,78%
			6			35	0	0,0	8	12,7	12	19,0	30	47,6	13	20,6	3,76
36	0	0,0				4	6,3	11	17,5	31	49,2	17	27,0	3,97	79,32%		
37	0	0,0				9	14,3	17	27,0	25	39,7	12	19,0	3,64	72,80%		
38	0	0,0				8	12,7	15	23,8	29	46,0	11	17,5	3,67	73,49%		
39	0	0,0				3	4,8	4	6,3	25	39,7	31	49,2	4,33	86,54%		
40	0	0,0				3	4,8	7	11,1	25	39,7	28	44,4	4,24	84,76%		
41	0	0,0				4	6,3	6	9,5	22	34,9	31	49,2	4,27	85,40%		
42	0	0,0				4	6,3	10	15,9	18	28,6	31	49,2	4,21	84,13%		
		43				0	0,0	4	6,3	9	14,3	19	30,2	31	49,2	4,22	84,44%
	Rerata					0	0,0	5,55	8,8	10,9	17,3	24,8	39,4	21,7	34,5	3,99	79,89%
	Rata-Rata											3,94	78,74%				



RANGKING REKAPITULASI JAWABAN INVESTOR DAN KREDITOR

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN										SKOR RATA- RATA	TCR
			STB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Naratif7	39	0	0	3	4,8	4	6,3	25	39,7	31	49,2	4,33	86,54%
2	Naratif9	41	0	0	4	6,3	6	9,5	22	34,9	31	49,2	4,27	85,40%
3	Kinerja2	23	0	0	3	4,8	6	9,5	26	41,3	28	44,4	4,24	84,87%
4	Naratif8	40	0	0	3	4,8	7	11,1	25	39,7	28	44,4	4,24	84,76%
5	Naratif11	43	0	0	4	6,3	9	14,3	19	30,2	31	49,2	4,22	84,44%
6	Naratif10	42	0	0	4	6,3	10	15,9	18	28,6	31	49,2	4,21	84,13%
7	Penggaran1	27	0	0	5	7,9	5	7,9	27	42,9	26	41,3	4,17	83,49%
8	Keuangan8	8	1	1,6	4	6,3	6	9,5	25	39,7	27	42,9	4,16	83,17%
9	Penggaran2	28	0	0	6	9,5	2	3,2	31	49,2	24	38,1	4,16	83,17%
10	Keuangan6	6	1	1,6	6	9,5	8	12,7	17	27	31	49,2	4,13	82,54%
11	Keuangan5	5	1	1,6	5	7,9	9	14,3	21	33,3	27	42,9	4,08	81,59%
12	Kinerja1	22	0	0	7	11,1	8	12,7	22	34,9	26	41,3	4,06	81,27%
13	Penggaran3	29	0	0	5	7,9	10	15,9	24	38,1	24	38,1	4,06	81,27%
14	Ekonomi9	17	0	0	7	11,1	8	12,7	23	36,5	25	39,7	4,05	80,95%
15	Keuangan7	7	1	1,6	6	9,5	9	14,3	22	34,9	25	39,7	4,03	80,63%
17	Ekonomi2	10	1	1,6	5	7,9	7	11,1	28	44,4	22	34,9	4,03	80,63%
18	Ekonomi7	15	0	0	5	7,9	10	15,9	27	42,9	21	33,3	4,02	80,32%
19	Ekonomi8	16	0	0	7	11,1	6	9,5	31	49,2	19	30,2	3,98	79,68%
20	Penggaran4	30	1	1,6	4	6,3	11	17,5	27	42,9	20	31,7	3,97	79,37%
21	Naratif4	36	0	0	4	6,3	11	17,5	31	49,2	17	27	3,97	79,32%
22	Ekonomi3	11	0	0	7	11,1	9	14,3	28	44,4	19	30,2	3,94	78,73%
23	Ekonomi5	13	0	0	5	7,9	13	20,6	27	42,9	18	28,6	3,92	78,41%
16	Ekonomi1	9	1	1,6	5	7,9	11	17,5	28	44,4	18	28,6	3,90	78,10%
24	Keuangan2	2	1	1,6	4	6,3	13	20,6	27	42,9	18	28,6	3,90	78,10%
25	Kinerja5	26	0	0	7	11,1	9	14,3	31	49,2	16	25,4	3,89	77,78%
26	Naratif2	34	0	0	8	12,7	13	20,6	20	31,7	22	34,9	3,89	77,78%
27	Keuangan1	1	1	1,6	5	7,9	13	20,6	27	42,9	17	27	3,86	77,14%
28	Kepatuhan1	18	0	0	7	11,1	10	15,9	31	49,2	15	23,8	3,86	77,14%
29	Kepatuhan4	21	0	0	7	11,1	10	15,9	31	49,2	15	23,8	3,86	77,14%
30	Keuangan3	3	1	1,6	5	7,9	14	22,2	27	42,9	16	25,4	3,83	76,51%
31	Kinerja3	24	0	0	7	11,1	11	17,5	31	49,2	14	22,2	3,83	76,51%
32	Kinerja4	25	0	0	7	11,1	14	22,2	25	39,7	17	27	3,83	76,51%
33	Penggaran5	31	1	1,6	6	9,5	14	22,2	24	38,1	18	28,6	3,83	76,51%
34	Penggaran6	32	1	1,6	8	12,7	13	20,6	20	31,7	22	34,9	3,81	76,19%
35	Keuangan4	4	1	1,6	7	11,1	13	20,6	26	41,3	16	25,4	3,78	75,56%

REKAPITULASI DISTRIBUSI JAWABAN INVESTOR

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN										SKOR RATA- RATA	TCR
			STB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Informasi	1	1,0	2,3	5,0	11,6	12,0	27,9	13,0	30,2	12,0	27,9	3,70	73,95%
	Kondisi	2	1,0	2,3	4,0	9,3	12,0	27,9	12,0	27,9	14,0	28,6	3,79	75,81%
	Keuangan	3	1,0	2,3	4,0	9,3	12,0	27,9	13,0	30,2	13,0	30,2	3,77	75,35%
		4	1,0	2,3	7,0	16,3	11,0	25,6	11,0	25,6	13,0	30,2	3,65	73,02%
		5	1,0	2,3	5,0	11,6	9,0	20,9	11,0	25,6	17,0	39,5	3,88	77,67%
		6	1,0	2,3	6,0	14,0	8,0	18,6	10,0	23,3	18,0	41,9	3,88	77,67%
		7	1,0	2,3	6,0	14,0	9,0	20,9	10,0	23,3	17,0	39,5	3,84	76,74%
		8	1,0	2,3	4,0	9,3	6,0	14,0	11,0	25,6	21,0	48,8	4,09	81,86%
Rerata		1,0	2,3	5,1	11,9	9,9	23,0	11,4	26,5	15,6	35,8	3,83	76,51%	
2	Informasi	9	1,0	2,3	5,0	11,6	7,0	16,3	15,0	34,9	15,0	34,9	3,88	77,67%
	Kondisi	10	1,0	2,3	5,0	11,6	6,0	14,0	16,0	37,2	15,0	34,9	3,91	78,14%
	Ekonomi	11	0,0	0,0	7,0	16,3	5,0	11,6	17,0	39,5	14,0	28,6	3,88	77,67%
		12	0,0	0,0	5,0	11,6	11,0	25,6	17,0	39,5	10,0	23,3	3,74	74,88%
		13	0,0	0,0	5,0	11,6	7,0	16,3	16,0	37,2	15,0	34,9	3,95	79,07%
		14	1,0	2,3	5,0	11,6	10,0	23,3	10,0	23,3	17,0	39,5	3,86	77,21%
		15	0,0	0,0	5,0	11,6	7,0	16,3	15,0	34,9	16,0	37,2	3,98	79,53%
		16	0,0	0,0	7,0	16,3	3,0	7,0	18,0	41,9	15,0	34,9	3,95	79,07%
17	0,0	0,0	7,0	16,3	4,0	9,3	16,0	37,2	16,0	37,2	3,95	79,07%		
Rerata		0,3	0,8	5,7	13,2	6,7	15,5	15,6	36,2	14,8	33,9	3,90	78,04%	
3	Informasi	18	0,0	0,0	7,0	16,3	6,0	14,0	18,0	41,9	12,0	27,9	3,81	76,28%
	Kepatuhan Terhadap Aturan	19	0,0	0,0	9,0	20,9	6,0	14,0	16,0	37,2	12,0	27,9	3,72	74,42%
		20	0,0	0,0	10,0	23,3	11,0	25,6	13,0	30,2	9,0	20,9	3,49	69,77%
		21	0,0	0,0	7,0	16,3	7,0	16,3	15,0	34,9	14,0	28,6	3,84	76,74%
	Rerata		0,0	0,0	8,3	19,2	7,5	17,5	15,5	36,1	11,8	26,3	3,72	74,30%
4	Informasi	22	0,0	0,0	7,0	16,3	6,0	14,0	12,0	27,9	18,0	41,9	3,95	79,07%
	Kinerja	23	0,0	0,0	3,0	7,0	3,0	7,0	16,0	37,2	21,0	48,8	4,27	85,43%
		24	0,0	0,0	7,0	16,3	9,0	20,9	16,0	37,2	11,0	25,6	3,72	74,42%
		25	0,0	0,0	7,0	16,3	10,0	23,3	14,0	28,6	12,0	27,9	3,72	74,42%
		26	0,0	0,0	7,0	16,3	6,0	14,0	19,0	44,2	11,0	25,6	3,79	75,81%
		Rerata		0,0	0,0	6,2	14,4	6,8	15,8	15,4	35,0	14,6	34,0	3,89
5	Informasi	27	0,0	0,0	5,0	11,6	3,0	7,0	15,0	34,9	20,0	46,5	4,16	83,26%
	perencanaan Dan Penggaran	28	0,0	0,0	6,0	14,0	2,0	4,7	15,0	34,9	20,0	46,5	4,14	82,79%
		29	0,0	0,0	5,0	11,6	6,0	14,0	14,0	28,6	18,0	41,9	4,05	80,93%
		30	1,0	2,3	4,0	9,3	7,0	16,3	15,0	34,9	16,0	37,2	3,95	79,07%
		31	1,0	2,3	6,0	14,0	8,0	18,6	15,0	34,9	13	30,2	3,77	75,35%
	32	1,0	2,3	7,0	16,3	9,0	20,9	12,0	27,9	14,0	28,6	3,72	74,42%	
Rerata		0,5	1,2	5,5	12,8	5,8	13,6	14,3	32,7	16,8	38,5	3,97	79,30%	

REKAPITULASI DISTRIBUSI JAWABAN INVESTOR

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN												RATA-RATA	TCR
			STR(1)		TR(2)		CR(3)		R(4)		SR(5)		RATA-RATA			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%				
1	Informasi	1	1,0	2,3	2,0	11,6	13,0	27,9	13,0	30,3	13,0	27,9	3,70	73,92%		
	Kondisi	2	1,0	2,3	4,0	9,3	13,0	27,9	13,0	27,9	14,0	28,8	3,79	75,81%		
	Keuangan	3	1,0	2,3	4,0	9,3	13,0	27,9	13,0	27,9	13,0	27,9	3,77	75,32%		
		4	1,0	2,3	2,0	11,6	13,0	27,9	13,0	27,9	13,0	27,9	3,63	73,02%		
		5	1,0	2,3	2,0	11,6	13,0	27,9	13,0	27,9	13,0	27,9	3,88	77,67%		
		6	1,0	2,3	6,0	14,0	8,0	18,8	10,0	20,8	18,0	41,9	3,88	77,67%		
		7	1,0	2,3	6,0	14,0	9,0	19,0	10,0	20,8	17,0	34,9	3,84	76,74%		
		8	1,0	2,3	4,0	9,3	6,0	14,0	11,0	22,9	21,0	43,8	4,09	81,86%		
	Rata		1,0	2,3	2,1	11,9	9,9	22,0	11,4	26,2	12,0	24,8	3,83	76,51%		
2	Informasi	9	1,0	2,3	7,0	16,0	7,0	16,0	12,0	24,9	12,0	24,9	3,88	77,67%		
	Kondisi	10	1,0	2,3	2,0	11,6	6,0	14,0	16,0	32,3	13,0	26,9	3,91	78,14%		
	Ekonomi	11	0,0	0,0	7,0	16,0	3,0	11,6	17,0	34,9	14,0	28,8	3,88	77,67%		
		12	0,0	0,0	3,0	11,6	11,0	22,9	7,0	16,0	10,0	20,8	3,74	74,82%		
		13	0,0	0,0	2,0	11,6	7,0	16,0	16,0	32,3	13,0	26,9	3,92	79,07%		
		14	1,0	2,3	2,0	11,6	10,0	20,8	16,0	32,3	17,0	34,9	3,86	77,21%		
		15	0,0	0,0	2,0	11,6	7,0	16,0	13,0	26,9	16,0	32,3	3,92	79,07%		
		16	0,0	0,0	7,0	16,0	3,0	11,6	7,0	16,0	11,0	22,9	3,92	79,07%		
		17	0,0	0,0	7,0	16,0	4,0	9,3	16,0	32,3	16,0	32,3	3,92	79,07%		
	Rata		0,3	0,8	2,7	13,2	6,7	12,2	12,6	26,2	14,8	29,9	3,90	78,04%		
3	Informasi	18	0,0	0,0	7,0	16,0	6,0	14,0	18,0	41,9	13,0	26,9	3,81	76,28%		
	Keputusan	19	0,0	0,0	6,0	14,0	6,0	14,0	16,0	32,3	13,0	26,9	3,72	74,42%		
	Tindakan	20	0,0	0,0	10,0	20,8	11,0	22,9	13,0	26,9	9,0	20,9	3,49	69,77%		
	Aman	21	0,0	0,0	7,0	16,0	7,0	16,0	13,0	26,9	14,0	28,8	3,84	76,74%		
	Rata		0,8	0,0	8,3	19,3	7,2	17,2	12,2	26,1	11,8	26,3	3,72	74,30%		
4	Informasi	22	0,0	0,0	7,0	16,0	6,0	14,0	12,0	24,9	18,0	41,9	3,92	79,07%		
	Kinerja	23	0,0	0,0	7,0	16,0	7,0	16,0	16,0	32,3	21,0	42,8	4,27	82,42%		
		24	0,0	0,0	7,0	16,0	6,0	14,0	10,0	20,8	11,0	22,9	3,72	74,42%		
		25	0,0	0,0	7,0	16,0	10,0	20,8	14,0	28,8	13,0	26,9	3,72	74,42%		
		26	0,0	0,0	6,0	14,0	11,0	22,9	14,0	28,8	11,0	22,9	3,79	75,81%		
	Rata		0,0	0,0	6,2	14,4	6,8	12,8	12,1	24,0	11,9	24,0	3,89	77,82%		
2	Informasi	27	0,0	0,0	2,0	11,6	3,0	11,6	7,0	16,0	20,0	46,2	4,16	82,26%		
	Perencanaan	28	0,0	0,0	6,0	14,0	2,0	11,6	17	32,3	20,0	46,2	4,14	82,29%		
	Dan	29	0,0	0,0	2,0	11,6	6,0	14,0	14,0	28,8	18,0	41,9	4,02	80,92%		
	Pengawasan	30	1,0	2,3	4,0	9,3	7,0	16,0	12,0	24,9	16,0	32,3	3,92	79,07%		
		31	1,0	2,3	6,0	14,0	8,0	18,8	12,0	24,9	13	26,3	3,77	75,32%		
		32	1,0	2,3	7,0	16,0	9,0	20,9	13,0	26,9	14,0	28,8	3,72	74,42%		
	Rata		0,2	1,2	2,2	12,8	2,8	12,6	14,3	27,7	16,8	34,2	3,97	79,30%		

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN										SKOR RATA-RATA	TCR
			STB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
6	Informasi	33	0,0	0,0	6,0	14,0	11,0	25,6	18,0	41,9	8,0	18,6	3,65	73,02%
	Naratif	34	0,0	0,0	8,0	18,6	11,0	25,6	10,0	23,3	14,0	28,6	3,70	73,95%
		35	0,0	0,0	8,0	18,6	10,0	23,3	16,0	37,2	9,0	20,9	3,60	72,09%
		36	0,0	0,0	4,0	9,3	6,0	14,0	21,0	48,8	12,0	27,9	3,95	78,91%
		37	0,0	0,0	8,0	18,6	12,0	27,9	15,0	34,9	8,0	18,6	3,54	70,85%
		38	0,0	0,0	7,0	16,3	12,0	27,9	16,0	37,2	8,0	18,6	3,58	71,67%
		39	0,0	0,0	3,0	7,0	3,0	7,0	14,0	21,0	23,0	53,5	4,33	86,51%
		40	0,0	0,0	3,0	7,0	5,0	11,6	15,0	34,9	20,0	46,5	4,21	84,19%
		41	0,0	0,0	4,0	9,3	3,0	7,0	15,0	34,9	21,0	48,8	4,23	84,65%
		42	0,0	0,0	4,0	9,3	5,0	11,6	11,0	25,6	23,0	53,5	4,23	84,65%
		43	0,0	0,0	4,0	9,3	5,0	11,6	12,0	27,9	22,0	51,2	4,21	84,19%
	Rerata		0,0	0,0	5,4	12,5	7,5	17,6	14,8	33,4	15,3	35,2	3,93	78,61%
Rata-Rata												3,87	77,43%	



RANGKING REKAPITULASI DISTRIBUSI JAWABAN INVESTOR

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN										SKOR RATA- RATA	TCR
			STB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Naratif7	39	0,0	0,0	3,0	7,0	3,0	7,0	14,0	21,0	23,0	53,5	4,33	86,51%
2	kinerja2	23	0,0	0,0	3,0	7,0	3,0	7,0	16,0	37,2	21,0	48,8	4,27	85,43%
3	Naratif9	41	0,0	0,0	4,0	9,3	3,0	7,0	15,0	34,9	21,0	48,8	4,23	84,65%
4	Naratif10	42	0,0	0,0	4,0	9,3	5,0	11,6	11,0	25,6	23,0	53,5	4,23	84,65%
5	Naratif8	40	0,0	0,0	3,0	7,0	5,0	11,6	15,0	34,9	20,0	46,5	4,21	84,19%
6	Naratif11	43	0,0	0,0	4,0	9,3	5,0	11,6	12,0	27,9	22,0	51,2	4,21	84,19%
7	Penggaran1	27	0,0	0,0	5,0	11,6	3,0	7,0	15,0	34,9	20,0	46,5	4,16	83,26%
8	Penggaran2	28	0,0	0,0	6,0	14,0	2,0	4,7	15,0	34,9	20,0	46,5	4,14	82,79%
9	Keuangan8	8	1,0	2,3	4,0	9,3	6,0	14,0	11,0	25,6	21,0	48,8	4,09	81,86%
10	Penggaran3	29	0,0	0,0	5,0	11,6	6,0	14,0	14,0	28,6	18,0	41,9	4,05	80,93%
11	Ekonomi7	15	0,0	0,0	5,0	11,6	7,0	16,3	15,0	34,9	16,0	37,2	3,98	79,53%
12	Ekonomi5	13	0,0	0,0	5,0	11,6	7,0	16,3	16,0	37,2	15,0	34,9	3,95	79,07%
13	Ekonomi8	16	0,0	0,0	7,0	16,3	3,0	7,0	18,0	41,9	15,0	34,9	3,95	79,07%
14	Ekonomi9	17	0,0	0,0	7,0	16,3	4,0	9,3	16,0	37,2	16,0	37,2	3,95	79,07%
15	kinerja1	22	0,0	0,0	7,0	16,3	6,0	14,0	12,0	27,9	18,0	41,9	3,95	79,07%
16	Penggaran4	30	1,0	2,3	4,0	9,3	7,0	16,3	15,0	34,9	16,0	37,2	3,95	79,07%
17	Naratif4	36	0,0	0,0	4,0	9,3	6,0	14,0	21,0	48,8	12,0	27,9	3,95	78,91%
18	Ekonomi2	10	1,0	2,3	5,0	11,6	6,0	14,0	16,0	37,2	15,0	34,9	3,91	78,14%
19	Keuangan5	5	1,0	2,3	5,0	11,6	9,0	20,9	11,0	25,6	17,0	39,5	3,88	77,67%
20	Keuangan6	6	1,0	2,3	6,0	14,0	8,0	18,6	10,0	23,3	18,0	41,9	3,88	77,67%
21	Ekonomi1	9	1,0	2,3	5,0	11,6	7,0	16,3	15,0	34,9	15,0	34,9	3,88	77,67%
22	Ekonomi3	11	0,0	0,0	7,0	16,3	5,0	11,6	17,0	39,5	14,0	28,6	3,88	77,67%
23	Ekonomi6	14	1,0	2,3	5,0	11,6	10,0	23,3	10,0	23,3	17,0	39,5	3,86	77,21%
24	Keuangan7	7	1,0	2,3	6,0	14,0	9,0	20,9	10,0	23,3	17,0	39,5	3,84	76,74%
25	Kepatuhan4	21	0,0	0,0	7,0	16,3	7,0	16,3	15,0	34,9	14,0	28,6	3,84	76,74%
26	Kepatuhan1	18	0,0	0,0	7,0	16,3	6,0	14,0	18,0	41,9	12,0	27,9	3,81	76,28%
27	Keuangan2	2	1,0	2,3	4,0	9,3	12,0	27,9	12,0	27,9	14,0	28,6	3,79	75,81%
28	kinerja4	26	0,0	0,0	7,0	16,3	6,0	14,0	19,0	44,2	11,0	25,6	3,79	75,81%
29	Keuangan3	3	1,0	2,3	4,0	9,3	12,0	27,9	13,0	30,2	13,0	30,2	3,77	75,35%
30	Penggaran5	31	1,0	2,3	6,0	14,0	8,0	18,6	15,0	34,9	13	30,2	3,77	75,35%
31	Ekonomi4	12	0,0	0,0	5,0	11,6	11,0	25,6	17,0	39,5	10,0	23,3	3,74	74,88%
32	Kepatuhan2	19	0,0	0,0	9,0	20,9	6,0	14,0	16,0	37,2	12,0	27,9	3,72	74,42%
33	kinerja3	24	0,0	0,0	7,0	16,3	9,0	20,9	16,0	37,2	11,0	25,6	3,72	74,42%
34	kinerja4	25	0,0	0,0	7,0	16,3	10,0	23,3	14,0	28,6	12,0	27,9	3,72	74,42%
35	Penggaran6	32	1,0	2,3	7,0	16,3	9,0	20,9	12,0	27,9	14,0	28,6	3,72	74,42%
36	Keuangan1	1	1,0	2,3	5,0	11,6	12,0	27,9	13,0	30,2	12,0	27,9	3,70	73,95%
37	Naratif2	34	0,0	0,0	8,0	18,6	11,0	25,6	10,0	23,3	14,0	28,6	3,70	73,95%
38	Keuangan4	4	1,0	2,3	7,0	16,3	11,0	25,6	11,0	25,6	13,0	30,2	3,65	73,02%
39	Naratif1	33	0,0	0,0	6,0	14,0	11,0	25,6	18,0	41,9	8,0	18,6	3,65	73,02%

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN										SKOR RATA- RATA	TCR
			STB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
40	Naratif3	35	0,0	0,0	8,0	18,6	10,0	23,3	16,0	37,2	9,0	20,9	3,60	72,09%
41	Naratif6	38	0,0	0,0	7,0	16,3	12,0	27,9	16,0	37,2	8,0	18,6	3,58	71,67%
42	Naratif5	37	0,0	0,0	8,0	18,6	12,0	27,9	15,0	34,9	8,0	18,6	3,54	70,85%
43	Kepatuhan3	20	0,0	0,0	10,0	23,3	11,0	25,6	13,0	30,2	9,0	20,9	3,49	69,77%



REKAPITULASI DISTRIBUSI JAWABAN KREDITOR

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN										SKOR RATA- RATA	TCR
			STB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Informasi	1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	14,0	70,0	2,0	25,0	4,20	0,84
	Kondisi	2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	15,0	75,0	4,0	20,0	4,15	0,83
	Keuangan	3	0,0	0,0	1,0	5,0	2,0	10,0	14,0	70,0	3,0	15,0	3,95	0,79
		4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	15,0	75,0	3,0	15,0	4,05	0,81
		5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	10,0	50,0	4,50	0,90
		6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	35,0	13,0	65,0	4,65	0,93
		7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	55,0	9,0	45,0	4,45	0,89
		8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	70,0	6,0	30,0	4,30	0,86
	Rerata		0,0	0,0	0,1	0,6	0,8	3,8	12,5	62,5	6,3	33,1	4,28	0,86
2	Informasi	9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	13,0	65,0	3,0	15,0	3,95	0,79
	kondisi	10	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	12,0	60,0	7,0	35,0	4,30	0,86
	Ekonomi	11	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	11,0	55,0	5,0	25,0	4,05	0,75
		12	1,0	5,0	1,0	5,0	5,0	25,0	8,0	40,0	5,0	25,0	3,75	0,75
		13	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	30,0	11,0	55,0	3,0	15,0	3,85	0,77
		14	0,0	0,0	2,0	10,0	7,0	35,0	8,0	40,0	3,0	15,0	3,60	0,72
		15	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	12,0	60,0	5,0	25,0	4,10	0,82
		16	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	13,0	65,0	4,0	20,0	4,05	0,81
		17	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	7,0	35,0	9,0	45,0	4,25	0,85
	Rerata		0,1	0,6	0,3	1,7	4,1	20,6	10,6	52,8	4,9	24,4	3,99	0,79
3	Informasi	18	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	13,0	65,0	3,0	15,0	3,95	0,79
	kepatuhan	19	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	30,0	13,0	65,0	1,0	5,0	3,75	0,75
	terhadap	20	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	30,0	12,0	60,0	2,0	10,0	3,80	0,76
	aturan	21	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	61,0	80,0	1,0	5,0	3,90	0,78
	Rerata		0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	23,8	24,8	67,5	1,8	8,8	3,85	0,77
4	Informasi	22	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0	50,0	8,0	40,0	4,30	0,86
	kinerja	23	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	10,0	50,0	7,0	35,0	4,18	0,84
		24	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	15,0	75,0	3,0	15,0	4,05	0,81
		25	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	11,0	55,0	5,0	20,0	4,05	0,81
		26	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	12,0	60,0	5,0	25,0	4,10	0,82
	Rerata		0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	14,0	11,6	58,0	5,6	27,0	4,14	0,83
5	Informasi	27	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	12,0	60,0	6,0	30,0	4,20	0,84
	perencanaan	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	80,0	4,0	20,0	4,20	0,84
	dan	29	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	10,0	50,0	6,0	30,0	4,10	0,82
	Penggaran	30	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	12,0	60,0	4,0	20,0	4,00	0,80

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN										SKOR RATA-RATA	TCR
			STB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
		31	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	30,0	9,0	45,0	5,0	25,0	3,95	0,79
		32	0,0	0,0	1,0	5,0	4,0	20,0	9,0	45,0	6,0	30,0	4,00	0,80
	Rerata		0,0	0,0	0,2	0,8	3,3	16,7	11,3	56,7	5,2	25,8	4,08	0,82
6	Informasi	33	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	11,0	55,0	4,0	20,0	3,95	0,79
	Naratif	34	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0	50,0	8,0	40,0	4,30	0,86
		35	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	14,0	70,0	4,0	20,0	4,10	0,82
		36	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	10,0	50,0	5,0	25,0	4,01	0,80
		37	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	25,0	10,0	50,0	4,0	20,0	3,85	0,77
		38	0,0	0,0	1,0	5,0	3,0	15,0	13,0	65,0	3,0	15,0	3,87	0,77
		39	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	11,0	55,0	8,0	40,0	4,33	0,87
		40	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0	50,0	8,0	40,0	4,30	0,86
		41	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	7,0	35,0	8,0	40,0	4,35	0,87
		42	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	7,0	35,0	8,0	40,0	4,15	0,83
		43	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	7,0	35,0	9,0	45,0	4,25	0,85
	Rerata		0,0	0,0	0,18	0,9	3,36	16,8	10	50,0	6,27	31,4	4,13	0,83
Rata-Rata												4,08	0,81	



RANGKING REKAPITULASI DISTRIBUSI JAWABAN KREDITOR

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN										SKOR RATA- RATA	TCR
			STB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Keuangan6	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	35,0	13,0	65,0	4,65	0,93
2	Keuangan5	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	10,0	50,0	4,50	0,90
3	Keuangan7	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	55,0	9,0	45,0	4,45	0,89
4	Naratif9	41	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	7,0	35,0	8,0	40,0	4,35	0,87
5	Naratif7	39	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	11,0	55,0	8,0	40,0	4,33	0,87
6	Keuangan8	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	70,0	6,0	30,0	4,30	0,86
7	Ekonomi2	10	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	12,0	60,0	7,0	35,0	4,30	0,86
8	kinerja1	22	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0	50,0	8,0	40,0	4,30	0,86
9	Naratif2	34	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0	50,0	8,0	40,0	4,30	0,86
10	Naratif8	40	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	10,0	50,0	8,0	40,0	4,30	0,86
11	Ekonomi9	17	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	7,0	35,0	9,0	45,0	4,25	0,85
12	Naratif11	43	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	7,0	35,0	9,0	45,0	4,25	0,85
13	Keuangan1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	14,0	70,0	2,0	25,0	4,20	0,84
14	Penggaran1	27	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	12,0	60,0	6,0	30,0	4,20	0,84
15	Penggaran2	28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	80,0	4,0	20,0	4,20	0,84
16	kinerja2	23	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	10,0	50,0	7,0	35,0	4,18	0,84
17	Keuangan2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	15,0	75,0	4,0	20,0	4,15	0,83
18	Naratif10	42	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	7,0	35,0	8,0	40,0	4,15	0,83
19	Ekonomi7	15	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	12,0	60,0	5,0	25,0	4,10	0,82
20	kinerja4	26	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	12,0	60,0	5,0	25,0	4,10	0,82
21	Penggaran3	29	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	10,0	50,0	6,0	30,0	4,10	0,82
22	Naratif3	35	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	14,0	70,0	4,0	20,0	4,10	0,82
23	Keuangan4	4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	15,0	75,0	3,0	15,0	4,05	0,81
24	Ekonomi8	16	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	13,0	65,0	4,0	20,0	4,05	0,81
25	kinerja3	24	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	15,0	75,0	3,0	15,0	4,05	0,81
26	kinerja4	25	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	11,0	55,0	5,0	20,0	4,05	0,81
27	Naratif4	36	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	10,0	50,0	5,0	25,0	4,01	0,80
28	Penggaran4	30	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	12,0	60,0	4,0	20,0	4,00	0,80
29	Penggaran6	32	0,0	0,0	1,0	5,0	4,0	20,0	9,0	45,0	6,0	30,0	4,00	0,80
30	Keuangan3	3	0,0	0,0	1,0	5,0	2,0	10,0	14,0	70,0	3,0	15,0	3,95	0,79
31	Ekonomi1	9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	13,0	65,0	3,0	15,0	3,95	0,79
32	Kepatuhan1	18	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	13,0	65,0	3,0	15,0	3,95	0,79
33	Penggaran5	31	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	30,0	9,0	45,0	5,0	25,0	3,95	0,79

NO	INDIKATOR	NO. ITEM	SKOR JAWABAN										SKOR RATA- RATA	TCR
			STB(1)		TB(2)		CB(3)		B(4)		SB(5)			
			F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
34	Naratif1	33	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	25,0	11,0	55,0	4,0	20,0	3,95	0,79
35	Kepatuhan4	21	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	15,0	61,0	80,0	1,0	5,0	3,90	0,78
36	Naratif6	38	0,0	0,0	1,0	5,0	3,0	15,0	13,0	65,0	3,0	15,0	3,87	0,77
37	Ekonomi5	13	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	30,0	11,0	55,0	3,0	15,0	3,85	0,77
38	Naratif5	37	0,0	0,0	1,0	5,0	5,0	25,0	10,0	50,0	4,0	20,0	3,85	0,77
39	Kepatuhan3	20	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	30,0	12,0	60,0	2,0	10,0	3,80	0,76
40	Ekonomi3	11	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	20,0	11,0	55,0	5,0	25,0	4,05	0,75
41	Ekonomi4	12	1,0	5,0	1,0	5,0	5,0	25,0	8,0	40,0	5,0	25,0	3,75	0,75
42	Kepatuhan2	19	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	30,0	13,0	65,0	1,0	5,0	3,75	0,75
43	Ekonomi6	14	0,0	0,0	2,0	10,0	7,0	35,0	8,0	40,0	3,0	15,0	3,60	0,72



LAMPIRAN 7
HASIL UJI MANOVA

TINGKAT PENDIDIKAN
Between-Subjects Factors

		Value Label	N
Tk.Pddk	12	SMA/Sederajat	11
	15	Diploma/Akademi	9
	17	Sarjana	33
	19	Pasca Sarjana	10

Descriptive Statistics

	Tk.Pddk	Mean	Std. Deviation	N
Keuangan	SMA/Sederajat	3.5455	.93420	11
	Diploma/Akademi	4.0000	.70711	9
	Sarjana	4.0606	.60927	33
	Pasca Sarjana	4.4000	.51640	10
	Total	4.0159	.70693	63
Ekonomi	SMA/Sederajat	3.3636	1.02691	11
	Diploma/Akademi	4.0000	.86603	9
	Sarjana	4.0000	.61237	33
	Pasca Sarjana	4.3000	.94868	10
	Total	3.9365	.82056	63
Kepatuhan	SMA/Sederajat	3.3636	1.02691	11
	Diploma/Akademi	3.8889	.92796	9
	Sarjana	3.9091	.76500	33
	Pasca Sarjana	4.2000	.91894	10
	Total	3.8571	.87726	63
Kinerja	SMA/Sederajat	3.1818	.87386	11
	Diploma/Akademi	4.1111	1.05409	9
	Sarjana	4.0909	.76500	33
	Pasca Sarjana	4.2000	.63246	10
	Total	3.9524	.86934	63
Anggaran	SMA/Sederajat	3.7273	1.27208	11
	Diploma/Akademi	4.2222	.97183	9
	Sarjana	4.0606	.60927	33
	Pasca Sarjana	4.3000	.94868	10
	Total	4.0635	.85898	63
Naratif	SMA/Sederajat	3.5809	.87169	11

Diploma/Akademi	3.7622	.56497	9
Sarjana	4.1127	.39709	33
Pasca Sarjana	4.2650	.52112	10
Total	3.9940	.58478	63

Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a

Box's M	100.238
F	1.159
df1	63
df2	2.637E3
Sig.	.185

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept + Tk.Pddk

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

	F	df1	df2	Sig.
Keuangan	2.253	3	59	.092
Ekonomi	2.952	3	59	.040
Kepatuhan	1.159	3	59	.333
Kinerja	1.206	3	59	.315
Anggaran	4.731	3	59	.005
Naratif	3.453	3	59	.022

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Tk.Pddk

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Keuangan	3.978 ^a	3	1.326	2.897	.043
	Ekonomi	5.101 ^b	3	1.700	2.737	.051
	Kepatuhan	3.953 ^c	3	1.318	1.776	.162
	Kinerja	8.005 ^d	3	2.668	4.052	.011
	Anggaran	2.030 ^e	3	.677	.913	.440
	Naratif	3.560 ^f	3	1.187	3.969	.012
Intercept	Keuangan	770.918	1	770.918	1.684E3	.000
	Ekonomi	738.286	1	738.286	1.189E3	.000
	Kepatuhan	710.090	1	710.090	957.352	.000

	Kinerja	730.783	1	730.783	1.110E3	.000
	Anggaran	800.484	1	800.484	1.080E3	.000
	Naratif	743.690	1	743.690	2.487E3	.000
Tk.Pddk	Keuangan	3.978	3	1.326	2.897	.043
	Ekonomi	5.101	3	1.700	2.737	.051
	Kepatuhan	3.953	3	1.318	1.776	.162
	Kinerja	8.005	3	2.668	4.052	.011
	Anggaran	2.030	3	.677	.913	.440
	Naratif	3.560	3	1.187	3.969	.012
Error	Keuangan	27.006	59	.458		
	Ekonomi	36.645	59	.621		
	Kepatuhan	43.762	59	.742		
	Kinerja	38.853	59	.659		
	Anggaran	43.716	59	.741		
	Naratif	17.642	59	.299		
Total	Keuangan	1047.000	63			
	Ekonomi	1018.000	63			
	Kepatuhan	985.000	63			
	Kinerja	1031.000	63			
	Anggaran	1086.000	63			
	Naratif	1026.164	63			
Corrected Total	Keuangan	30.984	62			
	Ekonomi	41.746	62			
	Kepatuhan	47.714	62			
	Kinerja	46.857	62			
	Anggaran	45.746	62			
	Naratif	21.202	62			

a. R Squared = .128 (Adjusted R Squared = .084)

b. R Squared = .122 (Adjusted R Squared = .078)

c. R Squared = .083 (Adjusted R Squared = .036)

d. R Squared = .171 (Adjusted R Squared = .129)

e. R Squared = .044 (Adjusted R Squared = -.004)

f. R Squared = .168 (Adjusted R Squared = .126)

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

General Linear Model Between-Subjects Factors

		Value Label	N
Lt.Pddk	1	Non Akuntansi	47
	2	Akuntansi	16

Descriptive Statistics

Lt.Pddk		Mean	Std. Deviation	N
Keuangan	Non Akuntansi	3.8511	.69089	47
	Akuntansi	4.5000	.51640	16
	Total	4.0159	.70693	63
Ekonomi	Non Akuntansi	3.7447	.82008	47
	Akuntansi	3.7447	.51640	16
	Total	3.9365	.82056	63
Kepatuhan	Non Akuntansi	3.6383	.87042	47
	Akuntansi	4.5000	.51640	16
	Total	3.8571	.87726	63
Kinerja	Non Akuntansi	3.7021	.83184	47
	Akuntansi	4.6875	.47871	16
	Total	3.9524	.86934	63
Anggaran	Non Akuntansi	3.8723	.87519	47
	Akuntansi	4.6250	.50000	16
	Total	4.0635	.85898	63
Naratif	Non Akuntansi	3.8836	.62447	47
	Akuntansi	4.3181	.25954	16
	Total	3.9940	.58478	63

Box's Test of Equality of Covariance Matrices^a

Box's M	40.354
F	1.615
df1	21
df2	2.986E3
Sig.	.038

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are equal across groups.

a. Design: Intercept + Lt.Pddk

Multivariate Tests^b

Effect		Value	F	Hypothesis df	Error df	Sig.
Intercept	Pillai's Trace	.980	4.530E2 ^a	6.000	56.000	.000
	Wilks' Lambda	.020	4.530E2 ^a	6.000	56.000	.000
	Hotelling's Trace	48.532	4.530E2 ^a	6.000	56.000	.000
	Roy's Largest Root	48.532	4.530E2 ^a	6.000	56.000	.000
Lt.Pddk	Pillai's Trace	.284	3.706 ^a	6.000	56.000	.004
	Wilks' Lambda	.716	3.706 ^a	6.000	56.000	.004
	Hotelling's Trace	.397	3.706 ^a	6.000	56.000	.004
	Roy's Largest Root	.397	3.706 ^a	6.000	56.000	.004

a. Exact statistic

b. Design: Intercept + Lt.Pddk

Levene's Test of Equality of Error Variances^a

	F	df1	df2	Sig.
Kuangan	.128	1	61	.722
Ekonomi	.899	1	61	.347
Kepatuhan	2.675	1	61	.107
Kinerja	2.599	1	61	.112
Anggaran	.975	1	61	.327
Naratif	7.154	1	61	.010

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept + Lt.Pddk

Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variable	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	Kuangan	5.027 ^a	1	5.027	11.813	.001
	Ekonomi	6.810 ^b	1	6.810	11.890	.001
	Kepatuhan	8.863 ^c	1	8.863	13.916	.000
	Kinerja	11.590 ^d	1	11.590	20.046	.000
	Anggaran	6.762 ^e	1	6.762	10.581	.002
	Naratif	2.254 ^f	1	2.254	7.255	.009
Intercept	Kuangan	832.455	1	832.455	1.956E3	.000
	Ekonomi	811.381	1	811.381	1.417E3	.000
	Kepatuhan	790.578	1	790.578	1.241E3	.000

	Kinerja	840.161	1	840.161	1.453E3	.000
	Anggaran	861.873	1	861.873	1.349E3	.000
	Naratif	802.952	1	802.952	2.585E3	.000
Lt.Pddk	Keuangan	5.027	1	5.027	11.813	.001
	Ekonomi	6.810	1	6.810	11.890	.001
	Kepatuhan	8.863	1	8.863	13.916	.000
	Kinerja	11.590	1	11.590	20.046	.000
	Anggaran	6.762	1	6.762	10.581	.002
	Naratif	2.254	1	2.254	7.255	.009
Error	Keuangan	25.957	61	.426		
	Ekonomi	34.936	61	.573		
	Kepatuhan	38.851	61	.637		
	Kinerja	35.267	61	.578		
	Anggaran	38.984	61	.639		
	Naratif	18.949	61	.311		
Total	Keuangan	1047.000	63			
	Ekonomi	1018.000	63			
	Kepatuhan	985.000	63			
	Kinerja	1031.000	63			
	Anggaran	1086.000	63			
	Naratif	1026.164	63			
Corrected Total	Keuangan	30.984	62			
	Ekonomi	41.746	62			
	Kepatuhan	47.714	62			
	Kinerja	46.857	62			
	Anggaran	45.746	62			
	Naratif	21.202	62			

a. R Squared = .162 (Adjusted R Squared = .149)

b. R Squared = .163 (Adjusted R Squared = .149)

c. R Squared = .186 (Adjusted R Squared = .172)

d. R Squared = .247 (Adjusted R Squared = .235)

e. R Squared = .148 (Adjusted R Squared = .134)

f. R Squared = .106 (Adjusted R Squared = .092)